

Buku ajar Sosiologi Pendidikan ini merupakan kontribusi penting dalam menjembatani pemahaman antara dunia pendidikan dan realitas sosial masyarakat. Disusun secara sistematis dalam sepuluh bab, buku ini mengajak pembaca—khususnya mahasiswa dan pendidik—untuk melihat pendidikan tidak semata sebagai ruang akademik, melainkan sebagai institusi sosial yang sarat akan nilai, kekuasaan, ideologi, dan dinamika perubahan.

Bab pertama membentangkan fondasi pemahaman tentang apa itu sosiologi pendidikan, perbedaannya dengan ilmu pendidikan, serta pentingnya pendekatan sosiologis untuk mengurai persoalan pendidikan di Indonesia. Pembaca diajak memahami bagaimana pendidikan merefleksikan dan memengaruhi struktur sosial masyarakat kita yang kompleks.

Bab kedua memperkenalkan beragam teori sosiologis dalam memahami pendidikan—mulai dari fungsionalisme hingga teori kritis. Di sini, mahasiswa dibekali dengan lensa teoritik yang kaya untuk menafsirkan fenomena pendidikan dari berbagai sudut pandang, termasuk isu ketimpangan, konflik, dan kekuasaan.

Bab ketiga hingga bab kelima mengulas secara mendalam pendidikan sebagai agen sosialisasi, agen perubahan sosial, serta ruang reproduksi maupun mobilitas sosial. Penulis menyajikan bagaimana sekolah, guru, kurikulum, dan kebijakan memiliki peran ganda—sebagai alat integrasi sosial sekaligus potensi perlawanan terhadap ketimpangan struktural.

Bab keenam dan ketujuh fokus pada hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, serta peran lembaga pendidikan dalam memfasilitasi mobilitas sosial vertikal. Diperlihatkan bagaimana latar belakang sosial siswa memengaruhi kesempatan belajar dan bagaimana pendidikan berperan dalam proses stratifikasi maupun perubahan status sosial.

Bab kedelapan menyajikan studi etnografi mini tentang dinamika sosial di lingkungan sekolah—sebuah pendekatan kontekstual yang memperkaya analisis sosiologis melalui realitas kehidupan siswa, relasi kekuasaan di sekolah, dan budaya institusi pendidikan.

Bab kesembilan mengaitkan pendidikan dengan agenda pembangunan sosial, literasi kewargaan, dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Buku ini tidak hanya menyoroti aspek mikro dalam pendidikan, tetapi juga menggandeng perspektif makro dan kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai penutup, bab kesepuluh menyuguhkan refleksi kritis terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan merumuskan peran strategis sosiolog pendidikan di masa depan. Disertai rekomendasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan kesetaraan, bab ini menjadi seruan akademik untuk membangun pendidikan sebagai alat transformasi sosial yang inklusif.

Dengan menggabungkan teori, kajian empiris, dan refleksi kontekstual, buku ajar ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam perkuliahan Sosiologi Pendidikan serta sebagai bahan diskusi lintas disiplin untuk memahami tantangan dan prospek pendidikan Indonesia masa kini dan mendatang.

DEWA
PUBLISHING

3rd Anniversary
**SMART
TOGETHER**
WITH DEWA PUBLISHING

Anggota IKAPI

Ds. Kalianyar RT. 003/ RW. 002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Jatim

www.dewapublishing.com
publishingdewa@gmail.com

dewapublishing
0877-7141-5004



DEWA
PUBLISHING

Sosiologi Pendidikan Dinamika Sosial dalam Institusi Pendidikan di Indonesia

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Sosiologi Pendidikan

Dinamika Sosial dalam Institusi Pendidikan di Indonesia

Editor :
Dr. Fitri arniati, M.Hum



DEWA
PUBLISHING

SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Dinamika Sosial dalam Institusi
Pendidikan di Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Dinamika Sosial dalam Institusi Pendidikan di Indonesia

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si



2025

SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Dinamika Sosial dalam Institusi Pendidikan
di Indonesia

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd
Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

Editor Naskah : Dr. Fitri Arniati, M.Hum
Perancang Sampul : Tim Dewa Publishing
Penata Letak : Tim Dewa Publishing

Diterbitkan oleh:



Redaksi:

CV. Dewa Publishing
Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot
Kab. Nganjuk, Jawa Timur
Anggota IKAPI: 341/JTI/2022

Email : publishingdewa@gmail.com
Website : www.dewapublishing.com
Phone : 0877-7141-5004

Cetakan Pertama, Juni 2025
i-x+153 hlm, 15.5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-517-313-9

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi
buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ajar ini yang berjudul **Sosiologi Pendidikan** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap dinamika sosial dalam dunia pendidikan.

Penyusunan buku ajar ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang komprehensif, kontekstual, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori sosiologi yang relevan, analisis kritis terhadap institusi pendidikan, serta isu-isu aktual dalam konteks pendidikan Indonesia.

Buku ajar ini terdiri atas sepuluh bab yang disusun secara sistematis, mulai dari kajian konsep dasar sosiologi pendidikan, relasi antara pendidikan dan mobilitas sosial, dinamika sosial di sekolah, hingga refleksi terhadap kebijakan pendidikan dalam konteks pembangunan sosial berkelanjutan. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, materi pokok, soal evaluasi, serta referensi yang mendukung agar mahasiswa dapat memahami dan mengkaji secara mandiri maupun dalam diskusi kelas.

Dalam penyusunan materi, penulis mengacu pada berbagai literatur akademik yang kredibel, baik dari sumber-sumber klasik maupun kajian mutakhir dalam sosiologi pendidikan. Di samping itu, penulis juga memasukkan pendekatan empiris dan reflektif berdasarkan realitas pendidikan di Indonesia, guna memberikan kedalaman dan relevansi praktis bagi mahasiswa.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat, tidak hanya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sosiologi Pendidikan, tetapi juga bagi dosen, peneliti, dan praktisi pendidikan yang ingin memperluas perspektif sosiologisnya dalam melihat persoalan pendidikan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat mendorong pembentukan sikap kritis dan solutif dalam merespons tantangan pendidikan masa kini.

Tentunya, dalam proses penulisan ini penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi maupun cakupan tema. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual dalam penyusunan buku ini. Khususnya kepada rekan sejawat, mahasiswa, dan lembaga pendidikan yang telah memberikan inspirasi dan ruang bagi penulis untuk terus berkarya dalam pengembangan pendidikan sosiologis.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang inklusif, adil, dan transformatif. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap ikhtiar kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Makassar, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PENDIDIKAN	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Materi Pembelajaran	1
C. Evaluasi	13
D. Daftar Pustaka	3
BAB II TEORI-TEORI SOSIOLOGI PENDIDIKAN	4
A. Tujuan Pembelajaran	4
B. Materi Pembelajaran	4
C. Evaluasi	17
D. Daftar Pustaka	20
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI AGEN SOSIALISASI	22
A. Tujuan Pembelajaran	22
B. Materi Pembelajaran	22
C. Evaluasi	33
D. Daftar Pustaka	36
BAB IV PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	38
A. Tujuan Pembelajaran	38
B. Materi Pembelajaran	38
C. Evaluasi	49
D. Daftar Pustaka	52

BAB V PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL	53
A. Tujuan Pembelajaran	53
B. Materi Pembelajaran	53
C. Evaluasi	68
D. Daftar Pustaka	71
BAB VI KETIMPANGAN PENDIDIKAN DALAM	
PERSPEKTIF SOSIOLOGI	72
A. Tujuan Pembelajaran	72
B. Materi Pembelajaran	72
C. Evaluasi	84
D. Daftar Pustaka	86
BAB VII PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM	
MOBILITAS SOSIAL	87
A. Tujuan Pembelajaran	87
B. Materi Pembelajaran	87
C. Evaluasi	100
D. Daftar Pustaka	103
BAB VIII STUDI KASUS DINAMIKA SOSIAL DI	
SEKOLAH	105
A. Tujuan Pembelajaran	105
B. Materi Pembelajaran	105
C. Evaluasi	116
D. Daftar Pustaka	119
BAB IX PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN	
SOSIAL	120
A. Tujuan Pembelajaran	120
B. Materi Pembelajaran	120
C. Evaluasi	134
D. Daftar Pustaka	137

BAB X REFLEKSI DAN PROSPEK SOSIOLOGI	
PENDIDIKAN DI INDONESIA	139
A. Tujuan Pembelajaran	139
B. Materi Pembelajaran	139
C. Evaluasi	147
D. Daftar Pustaka	150
BIOGRAFI PENULIS	151

BAB I

RUANG LINGKUP

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan.
2. Membedakan antara sosiologi pendidikan dan ilmu pendidikan.
3. Menguraikan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami fenomena pendidikan.
4. Mengidentifikasi relevansi sosiologi pendidikan dalam konteks masyarakat Indonesia.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji bagaimana pendidikan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terhubung dengan struktur sosial, nilai budaya, norma, serta berbagai kepentingan sosial lainnya. Dalam konteks ini, sosiologi pendidikan mencoba memahami

bagaimana proses pendidikan terjadi dalam masyarakat, siapa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana pengaruh sosial memengaruhi proses serta hasil pendidikan.

Ilmu ini menempatkan institusi pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi dan peran tertentu. Pendidikan dilihat bukan hanya sebagai kegiatan akademik di sekolah, tetapi juga sebagai proses sosial yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari antara individu dan kelompok. Sosiologi pendidikan memberikan pemahaman bahwa kegiatan belajar mengajar, relasi antara guru dan siswa, kurikulum, hingga tata kelola sekolah, semuanya terpengaruh oleh faktor sosial seperti kelas sosial, etnisitas, gender, dan kekuasaan.

Sejumlah tokoh telah memberikan definisi tentang sosiologi pendidikan. Good (1959) menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses dan pola sosial yang terjadi dalam institusi pendidikan. F.G. Robbins (1962) menyebutnya sebagai aplikasi prinsip dan metode sosiologi dalam bidang pendidikan. Kedua definisi ini menegaskan bahwa sosiologi pendidikan tidak hanya melihat pendidikan sebagai kegiatan individual, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Pendidikan dalam perspektif sosiologi dapat dilihat sebagai alat reproduksi sosial, yang dapat memperkuat struktur sosial yang sudah ada atau sebaliknya menjadi sarana perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi para mahasiswa untuk memahami bagaimana pendidikan menjadi arena pertarungan ideologi, nilai, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sosiologi pendidikan sangat penting untuk menganalisis berbagai isu pendidikan seperti

kesenjangan akses pendidikan, pengaruh latar belakang sosial terhadap prestasi siswa, serta peran pendidikan dalam pembangunan sosial. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami hambatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas karena keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas, atau diskriminasi sosial.

Selain itu, sosiologi pendidikan juga mengkaji bagaimana institusi pendidikan mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, analisis sosiologis terhadap pendidikan membantu kita memahami mengapa sekolah mengajarkan nilai-nilai tertentu dan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk identitas siswa.

Sosiologi pendidikan juga membahas dinamika interaksi antara berbagai aktor dalam dunia pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, dan birokrasi pendidikan. Interaksi ini tidak terlepas dari posisi sosial masing-masing pihak dan sering kali mencerminkan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, guru dari latar belakang etnis mayoritas mungkin memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan norma dan nilai yang diajarkan di sekolah.

Pemahaman sosiologis terhadap pendidikan juga membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Dengan melihat pendidikan dari perspektif sosial, para pengambil kebijakan dapat merancang program pendidikan yang mempertimbangkan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, sosiologi pendidikan bukan hanya penting sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai alat analisis kritis dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa sosiologi diharapkan dapat memahami peran penting pendidikan dalam membentuk masyarakat dan sekaligus dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Ruang lingkup sosiologi pendidikan mencakup berbagai aspek hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Hal ini meliputi kajian tentang bagaimana pendidikan memengaruhi struktur sosial dan bagaimana struktur sosial memengaruhi sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan tidak hanya fokus pada proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas, seperti pengaruh keluarga, lingkungan, kelas sosial, dan budaya terhadap pengalaman pendidikan individu.

Salah satu aspek penting dari ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah kajian tentang fungsi sosial pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi manifest, seperti mentransfer pengetahuan dan keterampilan, serta fungsi laten, seperti pembentukan karakter dan integrasi sosial. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran dalam mempertahankan tatanan sosial yang ada atau mendorong perubahan sosial tergantung pada konteks politik dan kultural masyarakat.

Sosiologi pendidikan juga mempelajari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal terjadi di sekolah dan institusi resmi, pendidikan nonformal berlangsung di luar institusi resmi seperti pelatihan kerja atau kursus, sementara

pendidikan informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi keluarga dan masyarakat. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk pemahaman individu tentang dunia sosialnya.

Ruang lingkup sosiologi pendidikan juga mencakup analisis terhadap ketimpangan dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perbedaan kelas sosial, gender, dan etnisitas dapat menciptakan akses yang tidak setara terhadap pendidikan berkualitas. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyoroti tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata di Indonesia.

Terakhir, sosiologi pendidikan mencakup peran pendidikan sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, norma, dan perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui peran ini, pendidikan membantu membentuk warga negara yang patuh terhadap aturan sosial, sekaligus menjadi tempat terjadinya resistensi dan perubahan nilai oleh generasi muda.

3. Perbedaan Sosiologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan

Sosiologi pendidikan dan ilmu pendidikan sering kali dianggap sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam fokus kajian, pendekatan, dan tujuan. Ilmu pendidikan lebih bersifat normatif dan aplikatif, karena bertujuan untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pendidikan agar lebih efektif. Di sisi lain, sosiologi pendidikan lebih bersifat analitis dan deskriptif, dengan fokus utama pada hubungan antara pendidikan dan struktur sosial.

Ilmu pendidikan banyak berfokus pada aspek pedagogis seperti strategi pembelajaran, kurikulum, psikologi pendidikan,

serta teknik evaluasi belajar. Pendekatannya cenderung mengutamakan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Sosiologi pendidikan, sebaliknya, lebih tertarik untuk memahami bagaimana latar belakang sosial peserta didik, status sosial ekonomi, atau relasi kekuasaan memengaruhi dan membentuk pengalaman pendidikan mereka (Ballantine & Spade, 2015).

Perbedaan lain terletak pada objek analisisnya. Ilmu pendidikan melihat pendidikan dari dalam sistem, sedangkan sosiologi pendidikan melihatnya dari luar sistem. Dalam hal ini, ilmu pendidikan berupaya memperbaiki kualitas pendidikan dari dalam institusi, sementara sosiologi pendidikan mencoba memahami mengapa dan bagaimana ketimpangan pendidikan terjadi, serta dampak sosial dari sistem pendidikan itu sendiri.

Dari segi metodologi, ilmu pendidikan cenderung menggunakan metode eksperimental dan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji efektivitas intervensi pendidikan tertentu. Sedangkan sosiologi pendidikan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemahaman konteks sosial (Sadovnik, 2007). Ini mencerminkan bahwa sosiologi pendidikan tidak semata-mata bertujuan memperbaiki sistem, tetapi mengkritisinya.

Sosiologi pendidikan juga membedakan dirinya dengan ilmu pendidikan melalui analisis kritis terhadap ideologi dan kekuasaan dalam institusi pendidikan. Teori kritis dalam sosiologi pendidikan, seperti yang dikembangkan oleh Paulo Freire, menyatakan bahwa pendidikan bisa menjadi alat penindasan atau pembebasan, tergantung pada bagaimana ia

dirancang dan dijalankan (Freire, 1970). Pendekatan ini jarang digunakan dalam ilmu pendidikan konvensional.

Dalam konteks ini, peran guru juga dipandang berbeda. Dalam ilmu pendidikan, guru adalah fasilitator pembelajaran. Namun dalam sosiologi pendidikan, guru bisa dilihat sebagai agen sosialisasi yang mereproduksi nilai dan norma dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyampaikan ideologi sosial tertentu secara tidak langsung.

Penting pula untuk menyoroti perbedaan dalam tujuan akhir. Ilmu pendidikan bertujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, sementara sosiologi pendidikan bertujuan memahami peran pendidikan dalam mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan sering digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan akses pendidikan.

Kedua bidang ini sebenarnya dapat saling melengkapi. Ilmu pendidikan dapat mengambil manfaat dari perspektif kritis dan makro yang ditawarkan oleh sosiologi pendidikan. Sebaliknya, sosiologi pendidikan dapat memperkaya analisisnya melalui pemahaman praktis yang dimiliki ilmu pendidikan tentang proses pembelajaran.

Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa dapat mengembangkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dunia pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi praktisi yang baik dalam sistem pendidikan, tetapi juga menjadi kritikus sosial yang mampu merefleksikan dan mengadvokasi perubahan demi sistem pendidikan yang lebih adil.

4. Pentingnya Sosiologi dalam Studi Pendidikan

Pentingnya sosiologi dalam studi pendidikan terletak pada kemampuannya memberikan perspektif kritis terhadap berbagai persoalan pendidikan dalam masyarakat. Melalui kacamata sosiologi, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses akademik yang berlangsung di sekolah, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas dan kompleks (Ballantine & Spade, 2015).

Sosiologi membantu menjelaskan bagaimana latar belakang sosial individu, seperti kelas ekonomi, ras, etnis, dan gender, memengaruhi akses dan hasil pendidikan. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki peluang pendidikan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga mampu, karena faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya, diskriminasi, dan lokasi geografis (Coleman, 1966).

Dengan sosiologi, kita juga dapat memahami bagaimana pendidikan digunakan oleh masyarakat untuk mentransmisikan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi utama yang membentuk perilaku dan identitas sosial siswa (Durkheim, 1956).

Sosiologi dalam pendidikan juga memungkinkan kita mengkritisi bagaimana institusi pendidikan tidak netral, tetapi dapat mencerminkan dan memperkuat ketimpangan sosial. Misalnya, teori reproduksi sosial oleh Pierre Bourdieu menunjukkan bagaimana sekolah secara tidak langsung melanggengkan dominasi budaya kelas atas melalui kurikulum tersembunyi (Bourdieu & Passeron, 1977).

Melalui studi sosiologi, kita dapat menelusuri ketimpangan pendidikan berdasarkan wilayah geografis, seperti antara desa dan kota. Hal ini penting dalam konteks Indonesia, di mana masih terjadi disparitas mutu dan akses pendidikan antara daerah pusat dan pinggiran, yang memperparah ketimpangan sosial (Tilaar, 2003).

Sosiologi juga membantu dalam memahami dinamika relasi antar aktor pendidikan: siswa, guru, orang tua, dan birokrat. Relasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh norma sosial, politik, dan kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Analisis relasi ini penting dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis dan partisipatif (Apple, 2004).

Lebih jauh, pendekatan sosiologi dalam pendidikan memberikan dasar untuk reformasi kebijakan. Dengan mengenali berbagai faktor sosial yang menghambat keadilan pendidikan, sosiolog dapat memberikan masukan untuk kebijakan inklusif dan transformatif. Hal ini penting agar pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, bukan alat dominasi (Giroux, 1983).

Sosiologi pendidikan juga relevan dalam membahas isu-isu kontemporer seperti bullying, radikalisme di sekolah, dan tantangan multikulturalisme. Isu-isu ini menuntut pemahaman sosial yang mendalam agar solusi yang ditawarkan tidak sekadar bersifat teknis, tetapi menyentuh akar persoalan (Willis, 1977).

Terakhir, pentingnya sosiologi dalam pendidikan juga tampak dalam kontribusinya terhadap pengembangan kurikulum. Kurikulum yang sensitif terhadap konteks sosial budaya peserta didik akan lebih relevan dan efektif dalam

membentuk karakter dan keterampilan sosial mereka (Banks, 2006).

Dengan demikian, sosiologi pendidikan menjadi alat analisis yang esensial dalam memahami dan membentuk sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermakna. Tanpa pendekatan sosiologis, pendidikan berisiko menjadi mekanisme formal semata yang gagal merespons kompleksitas kehidupan sosial.

5. Relevansi Sosiologi Pendidikan dalam Konteks Indonesia

Sosiologi pendidikan sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, kita dapat memahami bagaimana sistem pendidikan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan keragaman etnis, agama, dan kelas sosial (Tilaar, 2003).

Di Indonesia, pendidikan sering kali menjadi arena reproduksi ketimpangan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil memiliki akses yang lebih terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Perspektif sosiologi pendidikan mengungkapkan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan refleksi dari struktur sosial yang timpang (Suryadi, 2000).

Lebih jauh, pendekatan sosiologis juga penting untuk memahami dinamika pendidikan di tengah perubahan sosial. Reformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Misalnya, kebijakan Kurikulum Merdeka harus dilihat dalam kaitannya dengan tuntutan globalisasi,

perkembangan teknologi, dan perubahan nilai dalam masyarakat (Muhaimin, 2022).

Sosiologi pendidikan juga memungkinkan analisis mendalam terhadap tantangan multikulturalisme dalam pendidikan Indonesia. Negara ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan ratusan kelompok etnis. Sekolah harus menjadi ruang inklusif yang menghargai keberagaman, bukan malah menjadi alat homogenisasi budaya dominan (Banks, 2006).

Selain itu, perspektif sosiologis penting dalam melihat relasi kuasa dalam sistem pendidikan Indonesia. Sering kali, kebijakan pendidikan diambil secara top-down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat kontrol sosial daripada alat pemberdayaan (Apple, 2004).

Di tingkat mikro, relevansi sosiologi pendidikan tampak dalam interaksi di ruang kelas. Guru dan siswa membawa latar belakang sosial yang berbeda-beda. Interaksi ini dapat memperkuat atau justru melemahkan semangat inklusi dan keadilan sosial, tergantung pada cara institusi pendidikan meresponsnya (Nilan, 2009).

Sosiologi pendidikan juga penting dalam mengkaji masalah gender di sekolah. Masih ditemukan bias gender dalam buku pelajaran, pembagian peran di sekolah, dan harapan sosial terhadap siswa laki-laki dan perempuan. Pendekatan sosiologis membantu mengidentifikasi dan mendekonstruksi ketidakadilan ini (Sadker & Zittleman, 2009).

Dalam konteks pendidikan tinggi, sosiologi pendidikan dapat digunakan untuk memahami kesenjangan akses ke universitas unggulan. Mahasiswa dari kelompok marginal

sering mengalami hambatan struktural dan kultural yang membuat mereka sulit bersaing secara adil (Bourdieu & Passeron, 1977).

Pendekatan sosiologi juga membantu menjelaskan bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi-politik global. Misalnya, komersialisasi pendidikan dan masuknya logika pasar ke dalam institusi pendidikan dapat menciptakan ketimpangan baru dan mengaburkan fungsi sosial pendidikan (Rizvi & Lingard, 2010).

Dengan memahami relevansi sosiologi pendidikan dalam konteks Indonesia, kita dapat mendorong pembentukan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih adil, partisipatif, dan kontekstual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi hak dan alat transformasi sosial bagi semua warga negara.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang fokus pada:
 - a. Metode pengajaran
 - b. Interaksi sosial dalam konteks Pendidikan
 - c. Kurikulum sekolah
 - d. Psikologi belajar
2. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan pentingnya fungsi pendidikan dalam mempertahankan solidaritas sosial adalah:
 - a. Karl Marx
 - b. Max Weber
 - c. Emile Durkheim
 - d. Pierre Bourdieu
3. Salah satu fokus utama sosiologi pendidikan adalah:
 - a. Menyusun silabus
 - b. Menentukan metode evaluasi
 - c. Menganalisis ketimpangan dalam sistem pendidikan
 - d. Meningkatkan keterampilan mengajar
4. Teori reproduksi sosial dalam pendidikan dikembangkan oleh:
 - a. Ivan Illich
 - b. John Dewey
 - c. Emile Durkheim
 - d. Pierre Bourdieu

5. Salah satu tantangan utama pendidikan di Indonesia menurut perspektif sosiologi adalah:
 - a. Kualitas guru
 - b. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah
 - c. Kekurangan sarana olahraga
 - d. Jumlah universitas swasta

Essay

1. Jelaskan pengertian sosiologi pendidikan dan bagaimana perannya dalam memahami sistem pendidikan.
2. Bandingkan antara sosiologi pendidikan dan ilmu pendidikan dalam hal ruang lingkup dan fokus analisisnya.
3. Mengapa pendekatan sosiologis penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang adil dan inklusif?
4. Uraikan bagaimana pendidikan di Indonesia dapat menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial berdasarkan perspektif sosiologi.
5. Berikan contoh nyata dari kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan pentingnya pemahaman sosiologi pendidikan.

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. Routledge.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education*. Pearson.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Muhaimin. (2022). *Kurikulum Merdeka dan Tantangan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Nilan, P. (2009). *Youth Transitions in Indonesia: Gender and Class in a Changing Society*. Routledge.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
- Sadker, D., & Zittleman, K. (2009). *Teachers, Schools, and Society*. McGraw-Hill.
- Suryadi, A. (2000). *Pendidikan dalam Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Rineka Cipta.

BAB II

TEORI-TEORI

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan teori-teori utama dalam sosiologi pendidikan.
2. Menganalisis penerapan teori fungsionalisme dalam pendidikan.
3. Menguraikan perspektif teori konflik dalam konteks pendidikan.
4. Memahami pendekatan interaksionisme simbolik dalam interaksi pendidikan.
5. Mengidentifikasi kontribusi teori reproduksi sosial dan teori kritis terhadap kajian pendidikan.

B. Materi Pembelajaran

1. Teori Fungsionalisme dan Pendidikan

Teori fungsionalisme merupakan salah satu pendekatan klasik dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan bagaimana institusi pendidikan berfungsi untuk menjaga

stabilitas sosial dan meneruskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Durkheim, 1956).

Emile Durkheim, sebagai tokoh utama fungsionalisme, menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam pembentukan solidaritas sosial. Ia percaya bahwa pendidikan menanamkan kesadaran kolektif kepada individu sehingga tercipta keteraturan sosial. Menurutnya, nilai-nilai moral dan norma sosial yang ditanamkan di sekolah merupakan landasan utama bagi kohesi sosial (Durkheim, 1956).

Fungsionalis juga melihat pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk naik ke posisi sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang adil dianggap sebagai alat untuk meritokrasi, di mana keberhasilan ditentukan oleh prestasi dan bukan latar belakang sosial (Parsons, 1959).

Talcott Parsons memperluas pandangan Durkheim dengan menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi sebagai mekanisme seleksi dan alokasi peran. Sekolah menjadi tempat individu dinilai berdasarkan prestasi dan kemudian diarahkan menuju peran-peran sosial yang sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini dianggap penting untuk menjaga efisiensi dan integrasi dalam sistem sosial (Parsons, 1959).

Selain itu, teori fungsionalisme juga menyoroti fungsi laten pendidikan, seperti pengasuhan anak selama orang tua bekerja, serta integrasi imigran melalui proses asimilasi budaya dominan di sekolah. Pendidikan juga dianggap sebagai tempat sosialisasi sekunder yang melengkapi nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga (Merton, 1968).

Namun, pendekatan fungsionalisme juga mendapat kritik karena cenderung mengabaikan konflik dan ketimpangan dalam sistem pendidikan. Pandangan ini dianggap terlalu idealis dan mengasumsikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan bahwa sistem pendidikan selalu bekerja untuk kepentingan bersama (Bowles & Gintis, 1976).

Dalam konteks Indonesia, fungsi pendidikan menurut perspektif fungsional dapat terlihat dalam peran sekolah dalam membentuk karakter kebangsaan dan memperkuat persatuan nasional. Kurikulum nasional dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan semangat kebhinekaan yang penting untuk stabilitas masyarakat Indonesia yang majemuk (Tilaar, 2003).

Kendati demikian, fungsi-fungsi pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh fungsionalisme harus dievaluasi secara kritis, terutama dalam realitas sosial Indonesia yang masih diwarnai ketimpangan pendidikan antara kota dan desa, antara kelompok kaya dan miskin, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Kesimpulannya, teori fungsionalisme memberikan landasan penting dalam memahami peran institusi pendidikan dalam menjaga tatanan sosial dan menciptakan kohesi sosial. Namun, untuk pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dikombinasikan dengan teori-teori lain yang lebih kritis terhadap struktur sosial yang ada.

2. Teori Konflik dan Pendidikan

Teori konflik dalam sosiologi pendidikan berangkat dari pandangan bahwa sistem pendidikan tidak netral, melainkan merupakan arena pertarungan antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Teori ini menyoroti

bagaimana pendidikan mencerminkan dan memperkuat ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Karl Marx menjadi tokoh awal dalam pengembangan perspektif ini, yang melihat institusi sosial, termasuk pendidikan, sebagai alat reproduksi ideologi kelas yang dominan (Marx & Engels, 1970).

Menurut teori konflik, sistem pendidikan dirancang untuk mempertahankan status quo dan menguntungkan kelompok elit. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan norma yang menguntungkan kelas penguasa. Dalam hal ini, sekolah berfungsi sebagai alat ideologis negara untuk menanamkan kepatuhan dan legitimasi terhadap sistem kapitalisme (Althusser, 1971).

Bowles dan Gintis (1976) mengembangkan teori *correspondence*, yang menyatakan bahwa struktur sekolah mencerminkan struktur tempat kerja dalam masyarakat kapitalis. Hubungan otoritas antara guru dan siswa, serta sistem evaluasi dan disiplin, mencerminkan hierarki dan kontrol yang ada dalam dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bukan tempat pembebasan, melainkan reproduksi struktur kelas sosial.

Salah satu dampak nyata dari pendekatan konflik adalah munculnya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mendapat akses ke sekolah yang kurang berkualitas dan sumber daya yang terbatas, sementara anak-anak dari keluarga kaya mendapat fasilitas pendidikan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan reproduksi ketimpangan sosial antar generasi (Bourdieu & Passeron, 1977).

Pierre Bourdieu memperkuat argumen ini melalui konsep *cultural capital* dan *habitus*. Menurutnya, sekolah lebih menghargai bentuk-bentuk budaya yang dimiliki oleh kelas

dominan. Siswa dari latar belakang kelas bawah mengalami hambatan karena nilai dan gaya komunikasi mereka tidak sesuai dengan yang dihargai oleh institusi pendidikan. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kegagalan akademik dan marginalisasi (Bourdieu, 1986).

Selain itu, teori konflik juga menyoroti bagaimana kurikulum sekolah sering kali bias terhadap nilai-nilai kelompok dominan, termasuk dalam hal bahasa, sejarah, dan ideologi. Sejarah nasional, misalnya, sering kali ditulis dari perspektif penguasa, sementara narasi kelompok minoritas dan tertindas diabaikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya alat transmisi pengetahuan, tetapi juga arena ideologis (Apple, 2004).

Di Indonesia, ketimpangan pendidikan bisa dilihat dari perbedaan signifikan antara kualitas pendidikan di kota dan desa, serta antara daerah barat dan timur Indonesia. Hal ini diperparah oleh kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan akses dan kualitas. Perspektif konflik membantu mengungkap struktur-struktur sosial dan kebijakan yang menyebabkan ketidakadilan ini (Tilaar, 2003).

Kritik utama terhadap teori konflik adalah kecenderungannya yang terlalu pesimis dan deterministik. Teori ini sering mengabaikan potensi individu dan agen perubahan yang muncul dari institusi pendidikan. Meskipun demikian, pendekatan ini sangat berguna dalam menganalisis aspek-aspek kritis dalam sistem pendidikan, terutama dalam konteks ketimpangan struktural.

Dengan demikian, teori konflik memberikan lensa kritis untuk memahami bagaimana pendidikan dapat menjadi

instrumen kekuasaan dan dominasi. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat fungsi pendidikan dalam menjaga tatanan sosial, tetapi juga dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan.

Kesimpulannya, teori konflik sangat relevan untuk menganalisis tantangan pendidikan kontemporer, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Pendekatan ini mendorong perlunya reformasi kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berpihak kepada kelompok yang terpinggirkan.

3. Teori Interaksionisme Simbolik dan Pendidikan

Teori interaksionisme simbolik berfokus pada interaksi sehari-hari antara individu dalam setting sosial, termasuk di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini memandang pendidikan bukan hanya sebagai struktur formal, tetapi sebagai ruang sosial di mana makna-makna diciptakan dan dinegosiasikan melalui interaksi. George Herbert Mead dan Herbert Blumer adalah tokoh utama dalam pengembangan pendekatan ini (Blumer, 1969).

Dalam konteks pendidikan, interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana identitas siswa, guru, dan institusi pendidikan dibentuk melalui proses simbolik. Proses ini mencakup penggunaan bahasa, simbol, dan tindakan yang berulang dalam kehidupan sekolah. Interaksi sehari-hari antara guru dan siswa menciptakan makna yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, rasa percaya diri, dan bahkan prestasi akademik siswa (Mead, 1934).

Label yang diberikan kepada siswa oleh guru, seperti “pintar,” “nakal,” atau “bodoh,” merupakan salah satu contoh

konkret bagaimana makna sosial terbentuk dan berdampak pada perilaku. Howard Becker menyebut hal ini sebagai teori labeling. Ia berpendapat bahwa label yang diberikan guru sering kali mempengaruhi cara siswa melihat dirinya sendiri, dan ini berdampak pada hasil belajar mereka (Becker, 1963).

Proses labeling ini dapat menghasilkan efek yang disebut *self-fulfilling prophecy*, yaitu ketika siswa akhirnya berperilaku sesuai dengan label yang diberikan kepadanya. Jika seorang siswa dicap sebagai pemalas, maka ia cenderung tidak berusaha lebih dalam belajar, karena merasa bahwa usahanya sia-sia. Sebaliknya, label positif dapat memperkuat rasa percaya diri siswa dan memotivasinya untuk berprestasi (Rosenthal & Jacobson, 1968).

Teori ini juga menekankan pentingnya interaksi simbolik dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan sikap, ekspektasi, dan nilai-nilai yang dibaca oleh siswa melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi non-verbal dalam ruang kelas juga membentuk pengalaman belajar siswa (Goffman, 1959).

Selain itu, interaksionisme simbolik memberikan perhatian pada bagaimana siswa dan guru membentuk budaya sekolah. Budaya ini mencakup kebiasaan, nilai, dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Misalnya, budaya kompetisi atau kolaborasi antar siswa terbentuk melalui pola interaksi yang konsisten dalam komunitas sekolah.

Pendekatan ini sangat berguna dalam memahami dinamika ruang kelas, terutama dalam menjelaskan mengapa

siswa dari latar belakang sosial yang sama dapat memiliki pengalaman belajar yang berbeda. Interaksionisme simbolik melihat individu sebagai agen aktif yang membentuk makna dari setiap pengalaman pendidikan mereka.

Dalam praktiknya, teori ini mendorong pendekatan pedagogis yang lebih reflektif dan humanistik. Guru perlu menyadari bahwa cara mereka memperlakukan siswa, termasuk ekspektasi dan perlakuan sehari-hari, dapat membentuk identitas dan masa depan akademik siswa. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya relasi sosial yang sehat dan positif dalam pendidikan.

Di Indonesia, isu stereotip dan labeling masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Misalnya, siswa dari latar belakang etnis tertentu atau ekonomi rendah seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perspektif interaksionisme simbolik mengajak kita untuk lebih peka terhadap dampak interaksi sehari-hari terhadap keadilan pendidikan (Suryadi, 2000).

Secara keseluruhan, teori interaksionisme simbolik membantu kita memahami pendidikan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam interaksi mikro, bukan sekadar institusi formal. Teori ini relevan dalam membangun pendidikan yang menghargai identitas, pengalaman, dan dinamika relasi antarindividu di dalam kelas.

4. Teori Reproduksi Sosial dalam Pendidikan

Teori reproduksi sosial merupakan salah satu pendekatan kritis dalam sosiologi pendidikan yang menjelaskan bagaimana institusi pendidikan tidak hanya mereproduksi pengetahuan, tetapi juga mempertahankan dan melanggengkan struktur

sosial yang ada, termasuk ketimpangan kelas sosial. Tokoh utama dalam teori ini adalah Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, yang dalam karya mereka *Reproduction in Education, Society and Culture* (1977) menguraikan bahwa pendidikan berperan dalam mewariskan kapital budaya dan simbolik dari kelompok dominan kepada generasi berikutnya.

Bourdieu memperkenalkan konsep kapital budaya sebagai aset non-material yang dimiliki individu, seperti gaya bicara, pengetahuan, dan preferensi budaya, yang diperoleh melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan sosial. Menurut Bourdieu, sistem pendidikan cenderung menghargai kapital budaya kelas menengah dan atas, sehingga siswa dari kelas bawah cenderung mengalami kegagalan akademik karena tidak memiliki kapital yang sesuai dengan tuntutan sekolah (Bourdieu & Passeron, 1977).

Selain kapital budaya, Bourdieu juga menyoroti peran habitus, yaitu kerangka berpikir dan bertindak yang dibentuk oleh pengalaman sosial seseorang. Habitus memengaruhi bagaimana siswa memahami dan merespons pendidikan. Karena habitus dipengaruhi oleh latar belakang sosial, maka siswa dari kelompok kelas bawah akan menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan formal yang dirancang berdasarkan nilai-nilai kelompok dominan (Bourdieu, 1986).

Teori reproduksi sosial menantang pandangan meritokratis tentang pendidikan, yang menganggap bahwa kesuksesan ditentukan semata-mata oleh usaha dan kemampuan individu. Bourdieu menekankan bahwa keberhasilan dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh posisi sosial awal seseorang.

Sistem pendidikan justru menjadi alat reproduksi ketimpangan, karena menganggap bahwa kesuksesan akademik adalah hasil dari “kemampuan alamiah,” bukan hasil dari akumulasi kapital budaya yang tidak dimiliki semua orang secara merata (Bourdieu & Passeron, 1977).

Dalam konteks Indonesia, teori reproduksi sosial dapat membantu menjelaskan mengapa ketimpangan pendidikan masih tinggi. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih baik, guru privat, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi sarana maupun motivasi sosial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Nilan, 2009).

Praktik ujian standar nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi juga merupakan contoh bagaimana sistem pendidikan mendukung reproduksi sosial. Ujian tersebut mengandalkan pengetahuan akademik formal yang lebih mudah diakses oleh siswa dari sekolah unggulan dan keluarga berpendidikan. Hal ini menciptakan bias sistemik yang menguntungkan kelompok sosial tertentu dan memperlemah prinsip keadilan dalam pendidikan (Apple, 2004).

Salah satu kritik utama terhadap sistem pendidikan dalam kerangka teori reproduksi adalah bahwa ia menyembunyikan ketimpangan di balik ilusi netralitas dan objektivitas. Sekolah dianggap sebagai lembaga netral, padahal dalam kenyataannya, ia mereproduksi nilai-nilai dominan dan mengabaikan keberagaman latar belakang sosial-budaya siswa (Sadker & Zittleman, 2009).

Namun demikian, Bourdieu juga membuka ruang untuk perubahan sosial. Ia menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi alat mobilitas sosial jika dilakukan secara transformatif, misalnya dengan memperhatikan konteks lokal, menyusun kurikulum yang inklusif, serta memberikan afirmasi kepada siswa dari kelompok marjinal. Pendidikan kritis yang menyadarkan siswa tentang struktur sosial dan mendorong pemberdayaan menjadi penting dalam upaya melawan reproduksi ketimpangan (Freire, 1970).

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan afirmasi seperti beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah merupakan langkah yang sejalan dengan semangat melawan reproduksi sosial. Namun, kebijakan ini perlu dibarengi dengan reformasi kurikulum dan pelatihan guru yang sensitif terhadap ketimpangan sosial-budaya siswa agar lebih efektif dalam menciptakan keadilan pendidikan (Muhaimin, 2022).

Secara keseluruhan, teori reproduksi sosial memberikan kerangka kritis untuk memahami bagaimana pendidikan tidak selalu bekerja untuk semua orang secara setara. Sebaliknya, ia bisa menjadi alat yang memperkuat dominasi sosial jika tidak dikaji secara reflektif dan kritis. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mendorong reformasi pendidikan yang lebih adil dan inklusif di Indonesia dan di seluruh dunia.

5. Teori Kritis dan Pendidikan

Teori kritis dalam sosiologi pendidikan berangkat dari asumsi bahwa pendidikan bukanlah arena netral, melainkan sarat akan ideologi dan kekuasaan. Teori ini berupaya untuk mengungkap struktur ketidakadilan dan dominasi dalam sistem pendidikan serta mempromosikan perubahan sosial melalui

pembebasan dan kesadaran kritis. Para pemikir teori kritis, seperti Paulo Freire, Henry Giroux, dan Michael Apple, memandang pendidikan sebagai alat hegemoni sekaligus sebagai sarana potensial untuk emansipasi sosial.

Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970) mengembangkan pendekatan pedagogi kritis yang menolak model pendidikan "bank" di mana guru hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa secara satu arah. Ia menekankan pentingnya dialog antara guru dan siswa, serta mendorong siswa untuk mengkritisi realitas sosial mereka. Pendidikan, menurut Freire, harus membebaskan, bukan menindas, dan harus membuka ruang bagi kesadaran kritis (*critical consciousness*).

Henry Giroux memperluas ide Freire dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai praktik budaya dan politik. Dalam pandangannya, sekolah tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk identitas, nilai, dan kesadaran politik siswa. Oleh karena itu, pendidikan harus memfasilitasi resistensi terhadap struktur dominan dan memungkinkan siswa untuk menjadi agen perubahan (Giroux, 1983).

Michael Apple dalam *Ideology and Curriculum* (2004) mengkritik kurikulum sekolah yang secara sistematis mewakili kepentingan kelompok dominan. Ia menunjukkan bahwa pilihan materi pelajaran, cara pengajaran, dan penilaian siswa sering kali mereproduksi ketimpangan sosial, gender, dan rasial. Apple mendorong revisi kurikulum agar lebih adil, inklusif, dan merefleksikan realitas kehidupan siswa yang beragam.

Teori kritis juga memberikan perhatian pada bagaimana ideologi bekerja secara halus dalam institusi pendidikan.

Ideologi, menurut Althusser (1971), disebarkan melalui Aparatus Ideologis Negara, termasuk sekolah, untuk mereproduksi tatanan kapitalistik. Dengan demikian, pendidikan memainkan peran sentral dalam melanggengkan sistem kelas dan ketundukan terhadap otoritas yang dianggap sah.

Dalam praktiknya, pendekatan teori kritis menantang norma-norma otoriter di ruang kelas dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang demokratis. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat kekuasaan, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman hidup mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan epistemik, yang mengakui bahwa semua siswa memiliki suara dan pengalaman yang valid (Fricker, 2007).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kritis dapat digunakan untuk mengkaji masalah-masalah seperti dominasi kurikulum nasional terhadap kearifan lokal, ketimpangan gender dalam akses pendidikan, dan marginalisasi kelompok minoritas. Misalnya, pembelajaran sejarah yang didominasi narasi tunggal dapat dikritisi untuk membuka ruang bagi perspektif alternatif dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Muhaimin, 2022).

Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di Indonesia sejak 2022 sebenarnya memberi ruang bagi pendekatan kritis, karena memungkinkan guru dan sekolah untuk mengembangkan konten pembelajaran kontekstual. Namun, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam dari pendidik tentang makna pendidikan yang emansipatoris, bukan hanya sebagai penghafalan materi (Kemendikbud, 2022).

Teori kritis mengajak kita untuk tidak hanya mempersoalkan *apa* yang diajarkan, tetapi juga *mengapa* dan *untuk siapa* pendidikan itu dirancang. Dengan perspektif ini, pendidikan diposisikan sebagai ruang perjuangan ideologis yang harus dikelola secara sadar agar tidak memperkuat ketidakadilan, tetapi justru memberdayakan mereka yang selama ini terpinggirkan.

Dengan demikian, teori kritis tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menawarkan strategi transformasi sosial melalui pendidikan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus bersifat reflektif, partisipatif, dan transformatif, sehingga siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga subjek yang aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Teori fungsionalisme dalam pendidikan menekankan:
 - a. Konflik antara kelas social
 - b. Peran pendidikan dalam menjaga stabilitas social
 - c. Perlawanan terhadap kurikulum dominan
 - d. Ketimpangan akses pendidikan
2. Menurut Talcott Parsons, sekolah berfungsi sebagai:
 - a. Arena pembentukan identitas etnik
 - b. Mekanisme reproduksi ideologi
 - c. Mekanisme seleksi dan alokasi peran sosial
 - d. Lembaga kritik terhadap negara

3. Siapakah tokoh yang mempopulerkan konsep “pendidikan sebagai pembentuk solidaritas sosial”?
 - a. Karl Marx
 - b. Emile Durkheim
 - c. Pierre Bourdieu
 - d. Max Weber
4. Teori konflik dalam pendidikan berfokus pada:
 - a. Harmoni sosial melalui pendidikan
 - b. Reproduksi ketimpangan sosial
 - c. Interaksi simbolik di ruang kelas
 - d. Fungsi tersembunyi dari sekolah
5. Menurut Pierre Bourdieu, “habitus” dalam pendidikan berfungsi untuk:
 - a. Menyamarkan kemampuan siswa
 - b. Membentuk karakter kebangsaan
 - c. Mereproduksi struktur sosial melalui kebiasaan dan nilai
 - d. Mengembangkan kreativitas guru

Essay

1. Jelaskan secara ringkas bagaimana teori fungsionalisme memandang fungsi pendidikan dalam masyarakat.
2. Bandingkan pendekatan teori fungsionalisme dan teori konflik dalam melihat peran pendidikan dalam sistem sosial.
3. Jelaskan secara kritis bagaimana teori reproduksi sosial dari Bourdieu menunjukkan ketimpangan dalam pendidikan.
4. Mengapa teori interaksionisme simbolik penting dalam memahami interaksi antara guru dan siswa?
5. Uraikan kontribusi teori kritis terhadap pemikiran pendidikan yang emansipatoris dan transformatif.

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. Routledge.
- Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Review Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Collins, R. (1971). *Functional and Conflict Theories of Educational Stratification*. *American Sociological Review*, 36(6), 1002–1019.
- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. Free Press.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. Bergin & Garvey.
- Kemendikbud. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Muhaimin. (2022). *Kurikulum Merdeka dan Tantangan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Parsons, T. (1959). *The School Class as a Social System*. *Harvard Educational Review*, 29(4), 297–318.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Rineka Cipta.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI AGEN SOSIALISASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian sosialisasi dan peran lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk sosialisasi dalam lembaga pendidikan.
3. Menganalisis interaksi antara peserta didik dan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi.
4. Menjelaskan peran guru dan kurikulum dalam pembentukan nilai dan norma sosial.
5. Mengevaluasi efektivitas lembaga pendidikan dalam membentuk kepribadian dan identitas sosial peserta didik.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Sosialisasi dan Pendidikan sebagai Agen Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, serta pola-pola perilaku

yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Berger dan Luckmann (1966), sosialisasi adalah proses melalui mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat yang utuh. Dalam konteks pendidikan, proses ini menjadi krusial karena melalui lembaga pendidikan, individu dikenalkan secara sistematis pada struktur sosial, aturan main, dan peran sosial tertentu.

Lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi sekunder, yakni sosialisasi yang terjadi setelah sosialisasi primer dalam keluarga. Di sekolah, anak-anak belajar untuk menghormati otoritas (guru), bekerja sama dalam kelompok (teman sebaya), dan mengikuti aturan sosial (tata tertib sekolah). Hal ini sejalan dengan pandangan Talcott Parsons bahwa sekolah bertindak sebagai jembatan antara keluarga dan masyarakat luas (Parsons, 1959).

Selain berfungsi mentransmisikan pengetahuan, sekolah juga berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kejujuran ditanamkan melalui interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Pendidikan bukan hanya proses akademik, tetapi juga sosial-kultural yang membentuk kepribadian individu agar sesuai dengan harapan sosial.

Dalam kajian sosiologi, lembaga pendidikan juga dilihat sebagai arena internalisasi ideologi dan budaya dominan. Menurut Bourdieu, sekolah memainkan peran dalam mentransmisikan “modal budaya” yang memengaruhi posisi sosial seseorang di masyarakat (Bourdieu & Passeron, 1977). Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat netral, melainkan turut mereproduksi struktur sosial yang ada.

Peran lembaga pendidikan dalam sosialisasi juga dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan. Kurikulum formal dan tersembunyi (hidden curriculum) sama-sama memainkan peran penting. Hidden curriculum mencakup nilai-nilai yang tidak tertulis secara eksplisit, seperti ketertiban, kepatuhan, dan hierarki, namun tetap diajarkan melalui praktik institusional (Jackson, 1968).

Pendidikan juga membantu individu memahami identitas sosialnya dalam konteks kebangsaan, gender, kelas sosial, dan agama. Melalui materi pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pergaulan sosial, peserta didik mengembangkan pemahaman tentang siapa dirinya dan bagaimana ia terhubung dengan masyarakat luas. Ini penting untuk membentuk warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab.

Di negara multikultural seperti Indonesia, peran pendidikan dalam membangun toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi sangat penting. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk hidup bersama dalam perbedaan, menghargai budaya lain, dan mengembangkan empati sosial. Ini menjadikan lembaga pendidikan sebagai alat strategis untuk membentuk kohesi sosial.

Namun, dalam praktiknya, peran lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi tidak selalu berjalan ideal. Terdapat berbagai kendala seperti ketimpangan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta kurikulum yang tidak kontekstual. Hal ini dapat menghambat proses sosialisasi yang efektif, terutama bagi anak-anak dari kelompok sosial marginal.

Dengan demikian, memahami peran lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi memberikan wawasan kritis tentang

bagaimana sistem pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan inklusif. Ini sejalan dengan cita-cita sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memperjuangkan transformasi sosial.

2. Bentuk-bentuk Sosialisasi dalam Lembaga Pendidikan

Sosialisasi dalam lembaga pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang secara bersama-sama membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Bentuk pertama adalah sosialisasi formal, yang terjadi melalui proses pembelajaran terstruktur sesuai kurikulum yang dirancang. Dalam sosialisasi formal, pengetahuan akademik, norma, dan nilai-nilai sosial ditransmisikan secara sistematis oleh guru kepada siswa (Durkheim, 1956).

Selain sosialisasi formal, terdapat sosialisasi nonformal yang terjadi melalui aktivitas-aktivitas di luar jam pelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera, dan kegiatan keagamaan. Sosialisasi nonformal ini penting untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial yang tidak tercakup dalam kurikulum resmi tetapi esensial untuk pembentukan kepribadian (Coleman, 1961).

Sosialisasi informal juga sangat berperan, terutama melalui interaksi sehari-hari antara peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan staf sekolah. Dalam interaksi informal ini, siswa belajar memahami aturan sosial tidak tertulis seperti norma pergaulan, tata krama, dan hierarki sosial di lingkungan sekolah (Fine, 1987).

Selanjutnya, ada bentuk sosialisasi anticipatory, yaitu ketika siswa mempersiapkan diri untuk peran sosial yang akan

datang. Misalnya, dalam kelompok-kelompok belajar atau simulasi kegiatan sosial yang membantu siswa beradaptasi dengan tuntutan peran masa depan (Merton, 1957).

Selain itu, sosialisasi laten (hidden curriculum) merupakan bentuk sosialisasi yang tidak secara eksplisit diajarkan tetapi muncul dari budaya dan struktur sekolah itu sendiri. Nilai-nilai seperti disiplin, kepatuhan terhadap otoritas, dan persaingan sering diserap siswa tanpa disadari melalui rutinitas sekolah (Jackson, 1968).

Bentuk sosialisasi lainnya adalah sosialisasi kelompok sebaya yang berlangsung intens di lingkungan sekolah. Teman sebaya berperan penting dalam membentuk identitas sosial, gaya hidup, serta norma kelompok yang memengaruhi perilaku dan sikap siswa (Brown, 1990).

Lembaga pendidikan juga menjadi arena sosialisasi politik, di mana siswa belajar tentang struktur kekuasaan, partisipasi sosial, dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan misalnya, mengajarkan siswa nilai demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penghormatan terhadap perbedaan (Dewey, 1916).

Selain itu, sosialisasi gender juga terjadi di sekolah, yang membentuk persepsi dan peran gender sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Peran guru, materi pelajaran, serta interaksi sosial berkontribusi dalam membentuk identitas gender siswa (Lorber, 1994).

Pentingnya sosialisasi multikultural di sekolah menjadi semakin menonjol dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Sekolah sebagai agen sosialisasi diharapkan mampu

menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya, dan keterbukaan sosial (Banks, 2006).

Akhirnya, sosialisasi teknologi sebagai bentuk baru yang semakin berkembang di lembaga pendidikan mengajarkan siswa keterampilan digital, etika penggunaan teknologi, dan cara berkomunikasi di era digital, yang merupakan bagian penting dalam sosialisasi modern (Rheingold, 2012).

3. Peran Guru dalam Proses Sosialisasi di Sekolah

Guru memegang peran sentral dalam proses sosialisasi di sekolah karena mereka tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang mentransfer nilai, norma, dan budaya kepada siswa (Lortie, 1975). Peran guru meliputi pembentukan karakter dan identitas sosial peserta didik yang berdampak pada perkembangan kepribadian dan kemampuan sosial mereka.

Dalam proses sosialisasi formal, guru bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran yang telah terstruktur sesuai kurikulum sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang relevan dengan konteks masyarakat (Goodlad, 1984). Dengan demikian, guru menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan realitas sosial.

Selain itu, guru bertindak sebagai model peran (role model) bagi siswa. Perilaku, sikap, dan cara guru berinteraksi secara langsung mempengaruhi bagaimana siswa belajar norma dan nilai sosial, seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat (Bandura, 1977). Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan contoh positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Peran guru juga mencakup pengelolaan interaksi sosial antar siswa, termasuk mengarahkan mereka dalam membentuk kelompok belajar, membangun kerjasama, serta menyelesaikan konflik yang muncul. Ini penting agar siswa dapat belajar keterampilan sosial yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat (Wentzel, 1991).

Guru juga harus peka terhadap keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi siswa. Dengan pemahaman tersebut, guru dapat mengadaptasi metode sosialisasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi setiap individu, sehingga proses sosialisasi menjadi efektif dan adil (Banks, 2006).

Dalam konteks sosialisasi gender, guru berperan dalam menghindari stereotip dan bias gender yang dapat membatasi perkembangan siswa. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesetaraan dan menghargai perbedaan (Sadker & Zittleman, 2009).

Selain aspek akademik dan sosial, guru juga berperan sebagai fasilitator sosialisasi politik di sekolah dengan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan kewarganegaraan yang membekali siswa menjadi anggota masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab (Dewey, 1916).

Peran guru semakin kompleks di era digital, dimana mereka juga harus mengarahkan siswa dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara etis dan produktif, sekaligus mencegah dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu atau bullying daring (Rheingold, 2012).

Guru tidak hanya berinteraksi dengan siswa, tapi juga dengan orang tua dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem

sosialisasi pendidikan. Kerjasama antara guru dan pihak luar sekolah ini penting untuk menciptakan lingkungan sosialisasi yang konsisten dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh (Epstein, 2011).

Akhirnya, pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan agar guru selalu mampu menjalankan perannya secara optimal dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta dinamika sosial yang berubah dengan cepat (Darling-Hammond, 2000).

4. Pengaruh Lembaga Pendidikan terhadap Pembentukan Nilai dan Norma Sosial

Lembaga pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi utama yang memiliki peran besar dalam membentuk nilai dan norma sosial di masyarakat. Melalui sistem pendidikan formal, nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dan negara ditanamkan kepada peserta didik (Durkheim, 1956). Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan budaya dan menjaga kelangsungan sosial.

Nilai-nilai sosial yang diajarkan di sekolah meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan penghormatan terhadap orang lain. Penginternalan nilai-nilai ini tidak hanya terjadi secara eksplisit melalui pengajaran, tetapi juga melalui aturan dan budaya sekolah sehari-hari (Jackson, 1968).

Norma sosial yang berlaku di lingkungan sekolah membantu membentuk perilaku siswa dalam konteks sosial yang lebih luas. Misalnya, norma tentang ketepatan waktu, berpakaian rapi, dan menghormati guru merupakan bagian dari

proses sosialisasi norma yang akan diaplikasikan di luar sekolah (Goodlad, 1984).

Sekolah juga berperan dalam membentuk nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa diajarkan pentingnya partisipasi aktif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural (Dewey, 1916).

Selain itu, lembaga pendidikan juga menyebarkan nilai-nilai meritokrasi, di mana keberhasilan dan penghargaan didasarkan pada kemampuan dan prestasi individu. Namun, nilai ini kadang berkonflik dengan realitas sosial yang penuh ketimpangan (Bourdieu & Passeron, 1977).

Norma sosial di sekolah tidak hanya terbatas pada interaksi antara siswa dan guru, tetapi juga pada interaksi antar siswa sendiri. Norma seperti solidaritas kelompok, persaingan sehat, dan aturan dalam permainan atau kegiatan ekstrakurikuler turut membentuk sikap sosial yang positif (Brown, 1990).

Pengaruh lembaga pendidikan terhadap pembentukan nilai juga bisa bersifat ambigu. Di satu sisi, pendidikan mendorong integrasi sosial, tetapi di sisi lain bisa memperkuat stratifikasi sosial dengan menegaskan perbedaan kelas dan status sosial (Bowles & Gintis, 1976).

Peran kurikulum dan materi pelajaran sangat menentukan jenis nilai dan norma yang ditanamkan. Kurikulum yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman sosial akan memperkaya pemahaman siswa tentang nilai-nilai universal dan toleransi (Banks, 2006).

Selain itu, guru sebagai pelaksana pendidikan harus mampu menjadi agen sosialisasi yang efektif dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari (Sadker & Zittleman, 2009).

Akhirnya, perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi cara lembaga pendidikan membentuk nilai dan norma sosial. Pendidikan harus mampu mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai baru yang relevan dengan perubahan sosial dan kemajuan zaman (Rizvi & Lingard, 2010).

5. Dinamika Sosial di Sekolah dan Dampaknya pada Proses Sosialisasi

Sekolah sebagai sebuah lembaga sosial tidak lepas dari dinamika sosial yang terus berubah dan berkembang. Dinamika ini mencakup perubahan interaksi sosial, struktur kelas sosial, serta nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekolah (Coleman, 1961). Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses sosialisasi secara signifikan.

Salah satu bentuk dinamika sosial di sekolah adalah adanya perbedaan latar belakang sosial ekonomi siswa yang menimbulkan segregasi sosial. Perbedaan ini dapat menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang homogen, yang pada akhirnya memengaruhi interaksi antar siswa dan pola sosialisasi mereka (Bourdieu & Passeron, 1977).

Dinamika konflik sosial juga sering muncul di sekolah, baik dalam bentuk persaingan antar kelompok siswa, benturan nilai, maupun ketegangan antara guru dan siswa. Konflik ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses sosialisasi yang positif dan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan belajar (Apple, 2004).

Selain itu, adanya dinamika perubahan teknologi dan budaya populer turut memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial di sekolah. Penggunaan media sosial, misalnya, mengubah cara siswa berinteraksi dan mengekspresikan diri, yang membawa dampak baik positif maupun negatif dalam proses sosialisasi (Rheingold, 2012).

Dinamika kebijakan pendidikan dan reformasi kurikulum juga berperan dalam mengubah proses sosialisasi di sekolah. Kebijakan yang menekankan inklusivitas dan keberagaman diharapkan dapat memperkaya interaksi sosial dan memperkuat nilai toleransi di kalangan siswa (Muhaimin, 2022).

Sekolah sebagai mikro masyarakat juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi nasional yang berdampak pada alokasi sumber daya pendidikan. Ketimpangan sumber daya dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakadilan dalam sosialisasi pendidikan (Tilaar, 2003).

Interaksi antar guru dan siswa juga mengalami dinamika seiring dengan perubahan peran guru dari sekadar pengajar menjadi fasilitator dan pembimbing. Perubahan ini menuntut guru untuk lebih adaptif dalam mengelola hubungan sosial dan dinamika kelompok siswa (Sadker & Zittleman, 2009).

Dinamika sosial di sekolah juga berkaitan dengan proses pembentukan identitas sosial siswa. Melalui interaksi yang kompleks dengan teman sebaya dan guru, siswa mengembangkan identitas yang dapat berkontribusi pada rasa percaya diri dan keterikatan sosial (Nilan, 2009).

Selain itu, sekolah harus mampu merespon dinamika sosial yang muncul dari globalisasi, seperti masuknya nilai dan budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal. Pengelolaan

dinamika ini penting agar nilai-nilai lokal tetap terjaga sekaligus membuka ruang bagi inovasi sosial (Rizvi & Lingard, 2010).

Akhirnya, pemahaman terhadap dinamika sosial di sekolah penting bagi pengembangan strategi sosialisasi yang efektif, yang mampu mengakomodasi perbedaan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta inklusif (Banks, 2006).

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Peran utama guru dalam proses sosialisasi di sekolah adalah:
 - a. Menyusun kurikulum baru
 - b. Menjadi agen penanaman nilai dan norma social
 - c. Mengawasi ujian nasional
 - d. Menentukan kebijakan sekolah
2. Pengaruh lembaga pendidikan terhadap pembentukan nilai dan norma sosial terjadi melalui:
 - a. Hanya pengajaran materi akademik
 - b. Transmisi nilai dan norma sosial secara formal dan informal
 - c. Kegiatan ekstrakurikuler saja
 - d. Hubungan antara siswa dan orang tua

3. Dinamika sosial di sekolah dapat memengaruhi proses sosialisasi melalui:
 - a. Stabilitas sosial yang tidak berubah
 - b. Perubahan interaksi sosial dan konflik yang terjadi
 - c. Hanya pengaruh guru terhadap siswa
 - d. Tidak berpengaruh sama sekali
4. Konflik sosial di sekolah jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan:
 - a. Meningkatnya prestasi akademik
 - b. Gangguan proses sosialisasi dan pembelajaran
 - c. Lebih banyak teman
 - d. Kebijakan baru di sekolah
5. Dalam menghadapi dinamika sosial di era digital, guru harus mampu:
 - a. Membatasi penggunaan teknologi oleh siswa tanpa arahan
 - b. Mengarahkan penggunaan teknologi secara etis dan produktif
 - c. Mengabaikan perkembangan teknologi
 - d. Membiarkan siswa bebas menggunakan teknologi

Essay

1. Jelaskan peran guru sebagai agen sosialisasi dalam proses pendidikan formal di sekolah!
2. Bagaimana lembaga pendidikan berkontribusi dalam pembentukan nilai dan norma sosial di masyarakat?
3. Apa dampak dinamika sosial seperti konflik dan segregasi sosial di lingkungan sekolah terhadap proses sosialisasi siswa?
4. Jelaskan bagaimana perubahan teknologi dan budaya populer memengaruhi interaksi sosial di sekolah!
5. Bagaimana sebaiknya sekolah mengelola dinamika sosial yang muncul agar proses sosialisasi berjalan efektif?

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. Routledge.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education*. Pearson.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Brown, B. B. (1990). *Peer Groups and Peer Cultures*. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Eds.), *At the Threshold: The Developing Adolescent*. Harvard University Press.
- Coleman, J. S. (1961). *The Adolescent Society*. Free Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. Macmillan.
- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. Free Press.
- Goodlad, J. I. (1984). *A Place Called School*. McGraw-Hill.
- Jackson, P. W. (1968). *Life in Classrooms*. Holt, Rinehart and Winston.
- Muhaimin. (2022). *Kurikulum Merdeka dan Tantangan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Nilan, P. (2009). *Youth Transitions in Indonesia: Gender and Class in a Changing Society*. Routledge.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.

Sadker, D., & Zittleman, K. (2009). *Teachers, Schools, and Society*. McGraw-Hill.

Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Rineka Cipta.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial.
2. Mengidentifikasi peran pendidikan dalam proses modernisasi masyarakat.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial.
4. Memahami dampak pendidikan terhadap transformasi budaya dan nilai sosial.
5. Menguraikan tantangan dan peluang pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial di Indonesia.

B. Materi Pembelajaran

1. Hubungan Pendidikan dan Perubahan Sosial

Pendidikan dan perubahan sosial merupakan dua fenomena yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam dinamika masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai salah satu agen utama yang dapat mendorong atau menghambat

perubahan sosial melalui proses sosialisasi, transmisi nilai, dan pengembangan kemampuan individu (Parsons, 1959). Dengan demikian, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang berdampak pada struktur sosial.

Menurut Emile Durkheim (1956), pendidikan berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang membantu menciptakan solidaritas sosial dan keteraturan dalam masyarakat. Pendidikan menanamkan nilai-nilai kolektif yang diperlukan agar individu dapat berfungsi efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika nilai-nilai ini berkembang atau bergeser, pendidikan menjadi medium perubahan sosial yang signifikan.

Di sisi lain, Max Weber (1922) melihat pendidikan sebagai alat rasionalisasi dan birokratisasi dalam masyarakat modern. Pendidikan menghasilkan individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga mempercepat proses modernisasi dan perubahan sosial. Pendidikan membuka akses kepada posisi sosial yang lebih tinggi dan memperluas kesempatan individu untuk mobilitas sosial.

Pendidikan juga dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menantang struktur sosial yang sudah mapan. Antonio Gramsci (1971) memperkenalkan konsep hegemoni budaya, di mana pendidikan dapat menjadi medan pertarungan ideologi. Melalui pendidikan, kelompok dominan dapat mempertahankan kekuasaannya, tetapi di sisi lain, pendidikan juga membuka ruang bagi resistensi dan perubahan sosial melalui kritik dan pemberdayaan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional dan transformasi sosial. Pendidikan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan global (Tilaar, 2003). Namun, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan dapat berfungsi optimal sebagai agen perubahan sosial.

Lebih lanjut, pendidikan sebagai agen perubahan sosial tidak hanya berperan pada level individu, tetapi juga pada perubahan budaya dan sistem sosial secara luas. Misalnya, pendidikan dapat memengaruhi norma sosial yang berkaitan dengan gender, demokrasi, dan hak asasi manusia, sehingga memperkuat atau mengubah struktur sosial yang ada (Banks, 2006).

Pendidikan informal dan non-formal juga berkontribusi pada perubahan sosial di luar lembaga pendidikan formal. Melalui pelatihan, workshop, dan media massa, individu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat merubah pola pikir dan tindakan mereka dalam masyarakat (Rizvi & Lingard, 2010).

Namun demikian, perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan tidak selalu linier atau positif. Terkadang, proses pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial dan reproduksi budaya elit jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan (Bourdieu & Passeron, 1977). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap aspek kesetaraan dan keadilan sosial dalam pengembangan sistem pendidikan.

Akhirnya, hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial sangat kompleks dan multidimensional. Pendidikan dapat menjadi agen transformasi sosial yang efektif jika dirancang dan dikelola dengan memperhatikan konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Dengan pemahaman ini, pendidikan dapat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang dinamis, adil, dan berkelanjutan.

2. Peran Pendidikan dalam Proses Modernisasi

Modernisasi adalah proses perubahan sosial yang melibatkan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan ciri-ciri seperti industrialisasi, urbanisasi, sekularisasi, dan rasionalisasi (Inglehart & Baker, 2000). Pendidikan memegang peranan penting dalam proses ini sebagai agen yang mentransmisikan nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan masyarakat modern.

Menurut Talcott Parsons (1961), pendidikan berfungsi sebagai mekanisme seleksi dan sosialisasi yang menyiapkan individu untuk peran-peran baru dalam struktur sosial modern. Sekolah tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis dan pengetahuan ilmiah, tetapi juga nilai-nilai seperti individualisme, kompetisi, dan rasionalitas yang menjadi ciri masyarakat modern.

Salah satu aspek penting pendidikan dalam modernisasi adalah peningkatan mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu dapat mengatasi hambatan-hambatan sosial tradisional seperti status kelahiran dan mendapatkan kesempatan yang lebih adil untuk maju dalam karier dan kehidupan sosial (Bourdieu & Passeron, 1977). Oleh karena itu, pendidikan

berperan sebagai alat distribusi peluang yang dapat memperkecil kesenjangan sosial.

Peran pendidikan dalam proses modernisasi juga terlihat dalam pembentukan sumber daya manusia yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi global. Schultz (1961) menekankan pentingnya modal manusia yang diperoleh melalui pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, modernisasi melalui pendidikan juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dan dislokasi budaya. Parsons (1966) mengakui bahwa perubahan nilai dan norma yang cepat akibat modernisasi dapat menyebabkan konflik antara generasi atau kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan juga harus berperan sebagai mediator untuk mengelola perubahan sosial agar berjalan harmonis.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya modernisasi nasional yang telah berlangsung sejak masa Orde Baru hingga reformasi (Tilaar, 2003). Kurikulum dan kebijakan pendidikan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang produktif dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas budaya.

Pendidikan juga berperan dalam modernisasi sosial dengan mendorong kesadaran demokrasi, hak asasi manusia, dan keterbukaan terhadap keragaman budaya. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan inklusif di tengah proses modernisasi yang sering kali membawa homogenisasi budaya (Banks, 2006).

Lebih lanjut, pendidikan formal, nonformal, dan informal harus sinergis untuk mendukung proses modernisasi yang berkelanjutan. Pendidikan nonformal, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan masyarakat, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan (Rizvi & Lingard, 2010).

Akhirnya, keberhasilan pendidikan dalam mendukung modernisasi sangat bergantung pada kebijakan yang adil dan akses yang merata. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat memperlebar jurang sosial dan menghambat proses modernisasi yang inklusif dan berkelanjutan (Suryadi, 2000).

3. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam struktur masyarakat (Sorokin, 1927). Pendidikan memainkan peran sentral dalam memfasilitasi mobilitas sosial karena melalui pendidikan individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan legitimasi sosial yang dapat meningkatkan posisi sosialnya.

Menurut Kingsley Davis dan Wilbert E. Moore (1945), sistem pendidikan adalah mekanisme seleksi yang memungkinkan individu dengan kemampuan terbaik memperoleh posisi sosial yang sesuai dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai alat meritokrasi yang membuka kesempatan bagi individu untuk naik kelas sosial berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan hanya faktor keturunan atau kekayaan.

Mobilitas sosial yang difasilitasi pendidikan bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Vertikal berarti perpindahan ke posisi sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah, sementara horizontal adalah perpindahan dalam lapisan sosial yang sama, misalnya pindah pekerjaan dengan status sosial yang setara (Blau & Duncan, 1967).

Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan formal menjadi jalan utama untuk mencapai mobilitas sosial vertikal. Lulusan pendidikan tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan lebih tinggi, dan status sosial yang lebih prestisius dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah (Bourdieu & Passeron, 1977).

Namun, mobilitas sosial melalui pendidikan tidak selalu berjalan mulus karena adanya hambatan struktural seperti ketidakmerataan akses pendidikan, diskriminasi sosial, dan reproduksi budaya elit (Bowles & Gintis, 1976). Sistem pendidikan kadang-kadang dapat memperkuat ketimpangan sosial apabila akses dan kualitas pendidikan tidak setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, meskipun pendidikan telah membuka jalan bagi mobilitas sosial, kesenjangan geografis dan ekonomi masih menjadi kendala serius. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, sehingga mobilitas sosial mereka terbatas (Tilaar, 2003).

Selain itu, faktor budaya juga memengaruhi mobilitas sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Nilai dan norma keluarga, serta dukungan sosial, mempengaruhi keberhasilan individu dalam pendidikan dan kariernya. Oleh karena itu,

mobilitas sosial melalui pendidikan tidak hanya soal akses formal tetapi juga dukungan sosial dan budaya yang memadai (Coleman, 1988).

Pendidikan juga berperan dalam mobilitas sosial kolektif, yaitu pergeseran posisi sosial suatu kelompok dalam masyarakat. Misalnya, peningkatan akses pendidikan bagi kelompok minoritas atau marginal dapat mengubah posisi sosial kelompok tersebut dalam struktur sosial secara keseluruhan (Banks, 2006).

Akhirnya, meskipun pendidikan adalah alat yang kuat untuk mobilitas sosial, keberhasilan proses ini sangat tergantung pada kesetaraan akses dan kualitas pendidikan serta konteks sosial yang mendukung perubahan posisi sosial secara adil dan merata.

4. Pendidikan sebagai Alat Reproduksi Sosial

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat yang mereproduksi struktur sosial yang sudah ada. Konsep reproduksi sosial dalam pendidikan pertama kali dikembangkan oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron (1977), yang menyatakan bahwa sistem pendidikan cenderung mempertahankan dan memperkuat ketimpangan sosial antar kelompok kelas sosial.

Menurut Bourdieu (1986), sistem pendidikan mereproduksi struktur sosial melalui konsep *cultural capital* (modal budaya) dan *habitus*—yakni kecenderungan dan gaya hidup yang diperoleh dari lingkungan sosial keluarga. Anak-anak dari kelas sosial tinggi biasanya memiliki modal budaya yang lebih besar, seperti bahasa, nilai, dan sikap yang sesuai

dengan norma pendidikan formal, sehingga mereka lebih mudah berhasil dan naik kelas.

Sekolah sebagai institusi sosial tidak bersifat netral. Kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi sering kali mencerminkan nilai-nilai dan budaya kelas dominan, sehingga siswa dari kelas bawah menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dan berhasil dalam sistem pendidikan (Bowles & Gintis, 1976). Hal ini menyebabkan pendidikan justru memperkuat stratifikasi sosial yang ada daripada mengurangnya.

Reproduksi sosial juga terjadi melalui proses seleksi dan alokasi sosial dalam pendidikan, di mana individu diposisikan sesuai dengan kelas sosial asal mereka. Misalnya, siswa dari kelas menengah ke atas cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dan akses ke institusi pendidikan yang bergengsi, sementara siswa dari kelas bawah seringkali hanya mendapatkan pendidikan dasar yang terbatas (Apple, 2004).

Di Indonesia, fenomena reproduksi sosial melalui pendidikan juga tampak dari ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah dan kelompok sosial. Faktor ekonomi, budaya, dan geografis mempengaruhi peluang pendidikan yang tersedia bagi anak-anak dari latar belakang berbeda (Tilaar, 2003). Hal ini berkontribusi pada ketidaksetaraan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, pendidikan juga mereproduksi norma dan nilai sosial yang ada, termasuk norma yang berkaitan dengan gender, etnis, dan agama. Kadang-kadang, pendidikan dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi jika tidak ada upaya kritis untuk mengubahnya (Banks, 2006). Oleh karena itu,

pendidikan harus diarahkan untuk menjadi instrumen perubahan sosial yang inklusif dan progresif.

Namun demikian, meskipun pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan sosial, pendidikan juga memiliki potensi untuk menjadi alat transformasi sosial jika kebijakan dan praktik pendidikan diorientasikan untuk keadilan dan pemerataan kesempatan (Freire, 1970). Pendidikan kritis dan partisipatif dapat memberdayakan individu dan kelompok yang terpinggirkan untuk mengubah kondisi sosial mereka.

Pentingnya kesadaran akan peran pendidikan dalam reproduksi sosial mendorong para pembuat kebijakan untuk merancang sistem pendidikan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat reproduksi, tetapi juga alat transformasi sosial.

5. Pendidikan dan Kesetaraan Sosial

Kesetaraan sosial dalam pendidikan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau gender, harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan berkualitas (Banks, 2006). Pendidikan yang adil dan inklusif merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih egaliter dan demokratis.

Menurut John Rawls (1971), prinsip keadilan sebagai fairness menuntut adanya kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak menjadi alat untuk memperkuat ketimpangan sosial, melainkan menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan dan mempromosikan mobilitas sosial.

Namun, kenyataannya, ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, lokasi geografis, dan diskriminasi sosial sering kali menghambat kesempatan pendidikan yang setara (Tilaar, 2003). Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil cenderung menghadapi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan kesetaraan sosial melalui pendidikan melibatkan berbagai kebijakan, seperti pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok sosial (Rizvi & Lingard, 2010). Pendidikan inklusif juga mengupayakan pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus agar tidak terpinggirkan.

Pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan sosial tidak hanya menyediakan akses yang sama, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang setara. Hal ini berarti setiap siswa mendapatkan bimbingan, sumber belajar, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan optimal tanpa diskriminasi (Sadker & Zittleman, 2009).

Lebih jauh, kesetaraan sosial dalam pendidikan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pendidikan yang merata mendorong terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif, sehingga berdampak positif pada pembangunan ekonomi dan sosial (Schultz, 1961).

Dalam konteks global, agenda Pendidikan untuk Semua (Education for All) yang digagas UNESCO menegaskan

pentingnya kesetaraan pendidikan sebagai hak dasar manusia dan prasyarat pembangunan berkelanjutan (Rizvi & Lingard, 2010). Negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk menghapus hambatan pendidikan dan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal.

Namun demikian, kesetaraan sosial dalam pendidikan menghadapi tantangan dari praktik diskriminasi berbasis gender, etnis, dan budaya yang masih terjadi di berbagai tempat. Oleh karena itu, pendidikan juga harus mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan inklusivitas (Banks, 2006).

Kesimpulannya, pendidikan berperan strategis dalam menciptakan kesetaraan sosial yang berkelanjutan. Dengan memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata, pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Mobilitas sosial dalam konteks pendidikan berarti:
 - a. Perpindahan individu ke pekerjaan baru dalam bidang yang sama
 - b. Perubahan posisi sosial individu ke tingkat yang lebih tinggi atau rendah melalui pendidikan
 - c. Proses belajar di sekolah formal
 - d. Perpindahan geografis karena pendidikan

2. Tokoh yang mengemukakan konsep *cultural capital* sebagai faktor reproduksi sosial adalah:
 - a. Karl Marx
 - b. Emile Durkheim
 - c. Pierre Bourdieu
 - d. Max Weber
3. Pendidikan sebagai alat reproduksi sosial berarti:
 - a. Pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak
 - b. Pendidikan memperkuat struktur ketimpangan sosial yang sudah ada
 - c. Pendidikan hanya fokus pada transfer pengetahuan
 - d. Pendidikan menghilangkan perbedaan sosial
4. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan sosial melalui pendidikan di Indonesia adalah:
 - a. Kurikulum yang terlalu padat
 - b. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah
 - c. Banyaknya universitas swasta
 - d. Metode pengajaran yang kuno
5. Prinsip keadilan sebagai fairness dalam pendidikan dikemukakan oleh:
 - a. John Rawls
 - b. Paulo Freire
 - c. Michel Foucault
 - d. Bourdieu

Essay

1. Jelaskan pengertian mobilitas sosial dan bagaimana pendidikan berperan dalam proses tersebut!
2. Bagaimana konsep *cultural capital* dan *habitus* menurut Bourdieu menjelaskan reproduksi sosial dalam pendidikan?
3. Uraikan tantangan yang dihadapi pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan sosial di Indonesia!
4. Mengapa pendidikan dapat menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial? Berikan contoh nyata!
5. Bagaimana pendidikan inklusif dapat berkontribusi pada kesetaraan sosial? Jelaskan!

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum*. Routledge.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural Diversity and Education*. Pearson.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
- Sadker, D., & Zittleman, K. (2009). *Teachers, Schools, and Society*. McGraw-Hill.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Rineka Cipta.

BAB V

PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial dan hubungannya dengan pendidikan.
2. Menguraikan peran pendidikan dalam mempengaruhi mobilitas sosial vertikal dan horizontal.
3. Menganalisis hambatan-hambatan struktural yang memengaruhi peran pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.
4. Mengidentifikasi hubungan antara kelas sosial dan akses terhadap pendidikan.
5. Mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan di Indonesia mampu mendukung mobilitas sosial.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Mobilitas Sosial dan Relevansinya dalam Pendidikan

Mobilitas sosial merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat, yang dapat bersifat

vertikal (naik/turun status sosial) maupun horizontal (berpindah status tanpa perubahan derajat sosial). Dalam kajian sosiologi, mobilitas sosial dianggap sebagai salah satu indikator dinamika masyarakat, yang memperlihatkan sejauh mana sistem sosial memungkinkan atau menghambat perpindahan status sosial (Sorokin, 1959).

Pendidikan memainkan peran krusial dalam proses mobilitas sosial. Pendidikan formal menyediakan akses terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kredensial yang menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sehingga berpotensi meningkatkan status sosial seseorang. Oleh karena itu, institusi pendidikan sering dipandang sebagai "escalator" sosial yang dapat mengangkat individu dari kelas sosial rendah ke kelas yang lebih tinggi (Boudon, 1974).

Menurut perspektif fungsionalis, sistem pendidikan dirancang untuk mendistribusikan individu ke dalam posisi sosial berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka (meritokrasi). Dalam hal ini, pendidikan menjadi sarana seleksi sosial yang adil dan objektif, yang memungkinkan semua orang, terlepas dari latar belakang ekonomi, untuk maju berdasarkan kapasitasnya (Davis & Moore, 1945).

Namun, teori konflik memandang peran pendidikan secara lebih kritis. Tokoh seperti Pierre Bourdieu berpendapat bahwa pendidikan sering kali mereproduksi struktur kelas sosial melalui mekanisme seperti "modal budaya" dan "habitus" yang diwariskan keluarga. Sekolah lebih menguntungkan anak-anak dari kelas atas karena nilai-nilai dan kebiasaan mereka lebih dekat dengan norma akademik yang dihargai di sekolah (Bourdieu & Passeron, 1977).

Meskipun secara teoritis pendidikan menjanjikan peluang mobilitas sosial, realitasnya menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi. Faktor ekonomi, kualitas sekolah, jaringan sosial, dan kebijakan negara menjadi hambatan struktural yang menghalangi banyak individu untuk benar-benar memperoleh manfaat dari pendidikan. Hal ini terlihat jelas dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelas masih signifikan (Tilaar, 2003).

Penting untuk mencermati bahwa mobilitas sosial melalui pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika mobilitas sosial meningkat, masyarakat menjadi lebih terbuka dan dinamis. Sebaliknya, ketika mobilitas sosial rendah, ketimpangan cenderung mengeras dan bisa memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, pendidikan yang inklusif dan merata menjadi kunci stabilitas sosial (Kerbo, 2003).

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tujuan ini tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai mekanisme keadilan sosial. Namun, implementasi kebijakan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan kualitas layanan (Muhaimin, 2022).

Konsep mobilitas sosial juga tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Di banyak daerah, pendidikan tinggi dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan, namun masih banyak pula masyarakat

yang memandang pendidikan hanya sebatas formalitas, bukan alat transformasi sosial. Ini menunjukkan perlunya pendidikan berbasis nilai yang menginternalisasi pentingnya perubahan sosial (Suryadi, 2000).

Selain aspek struktural dan kultural, faktor psikologis seperti motivasi, aspirasi, dan harapan keluarga juga turut mempengaruhi efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Pendidikan yang berhasil menciptakan mobilitas sosial bukan hanya ditentukan oleh struktur formalnya, melainkan oleh sejauh mana peserta didik dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan peluang yang ada (Coleman, 1988).

Dengan demikian, pemahaman tentang mobilitas sosial dan hubungannya dengan pendidikan menjadi penting dalam kajian sosiologi pendidikan. Pendidikan bukan hanya arena akademik, tetapi juga medan pertarungan sosial yang menentukan nasib individu dan arah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan setara adalah bagian dari agenda besar untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.

2. Pendidikan sebagai Sarana Mobilitas Sosial Vertikal dan Horizontal

Mobilitas sosial vertikal merujuk pada perubahan status sosial seseorang ke arah yang lebih tinggi (mobilitas naik) atau lebih rendah (mobilitas turun), sedangkan mobilitas horizontal mencakup perpindahan posisi sosial tanpa perubahan signifikan dalam derajat atau status, seperti berpindah pekerjaan dengan tingkat sosial yang sama (Horton & Hunt, 1992). Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong kedua jenis mobilitas

ini melalui pemberian kualifikasi, legitimasi status sosial, serta penguatan jaringan sosial.

Dalam konteks mobilitas vertikal, pendidikan memberikan peluang untuk peningkatan status sosial melalui akuisisi gelar, sertifikasi, atau keahlian yang dihargai dalam pasar kerja. Misalnya, seseorang dari latar belakang ekonomi rendah yang berhasil menempuh pendidikan tinggi memiliki kemungkinan untuk mengakses pekerjaan bergaji tinggi, memperluas jejaring profesional, dan meningkatkan prestise sosialnya (Kerbo, 2003).

Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai saluran legal untuk mobilitas vertikal dalam masyarakat modern yang menganut sistem meritokrasi. Sistem ini mengedepankan pencapaian dan kompetensi sebagai dasar keberhasilan sosial, dan pendidikan adalah instrumen utamanya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan afirmatif seperti beasiswa untuk kelompok miskin dan akses pendidikan tinggi untuk wilayah tertinggal menjadi bentuk konkret penguatan mobilitas vertikal melalui pendidikan (Muhaimin, 2022).

Namun, dalam praktiknya, sistem meritokrasi tidak sepenuhnya netral. Struktur sosial yang timpang dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas membuat mobilitas vertikal menjadi lebih sulit dicapai bagi kelompok miskin. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kelas menengah atas cenderung lebih mudah mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi sosialnya berkat dukungan modal ekonomi dan budaya (Bourdieu & Passeron, 1977).

Sementara itu, pendidikan juga mendorong mobilitas horizontal, terutama dalam konteks dinamika profesi dan pengembangan karier. Seseorang dengan latar pendidikan

tertentu dapat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang setara dalam hierarki sosial, tetapi berbeda dalam bidang. Misalnya, seorang guru pindah menjadi konsultan pendidikan, atau seorang insinyur menjadi manajer proyek—keduanya memiliki status sosial yang relatif setara meskipun berada dalam jalur karier yang berbeda.

Pendidikan juga memperluas spektrum pilihan karier dan memungkinkan transisi antar sektor. Dalam masyarakat yang bergerak cepat seperti saat ini, keterampilan baru yang diperoleh melalui pendidikan berkelanjutan atau pelatihan vokasional memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi, yang sering kali mengharuskan mobilitas horizontal (UNESCO, 2020).

Di sisi lain, kegagalan sistem pendidikan dalam menyediakan pendidikan yang relevan dan berkualitas dapat menyebabkan stagnasi sosial. Lulusan yang tidak mampu memenuhi tuntutan pasar kerja, atau yang berasal dari institusi pendidikan dengan reputasi rendah, berisiko mengalami “mobilitas ke bawah” secara vertikal, bahkan jika mereka memiliki ijazah formal (Collins, 1979). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan legitimasi institusi pendidikan sangat menentukan efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sosial.

Pendidikan juga berkontribusi terhadap pembentukan jaringan sosial (social capital) yang penting dalam proses mobilitas sosial. Lingkungan sekolah dan perguruan tinggi menyediakan akses terhadap teman sebaya, dosen, alumni, dan mentor yang dapat membuka peluang kerja dan kolaborasi profesional. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya

mentransfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan modal sosial yang mendukung mobilitas (Coleman, 1988).

Dari perspektif kebijakan, pendidikan yang dirancang untuk mendorong mobilitas sosial harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, keberlanjutan, dan relevansi kurikulum. Pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif semata cenderung mengabaikan keterampilan sosial dan soft skills yang justru dibutuhkan dalam dunia kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam pendidikan menjadi semakin penting untuk meningkatkan mobilitas sosial (Sadker & Zittleman, 2009).

Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai sarana utama untuk mendorong mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Namun, peran ini hanya akan efektif apabila pendidikan dirancang secara adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa hal itu, pendidikan justru bisa menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial, alih-alih mendorong mobilitas.

3. Peran Pendidikan dalam Mobilitas Sosial Vertikal dan Horizontal

Pendidikan memainkan peran penting dalam proses mobilitas sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas vertikal merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial dalam tingkat yang sejajar tanpa perubahan strata, misalnya berpindah profesi namun tetap dalam kelas sosial yang sama (Sorokin, 1959). Dalam konteks

ini, pendidikan menjadi sarana krusial untuk membuka peluang bagi perubahan posisi sosial tersebut.

Secara vertikal, pendidikan memungkinkan individu dari kelas sosial bawah untuk meningkatkan statusnya melalui perolehan kualifikasi akademik, keterampilan kerja, dan akses terhadap pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, seorang anak petani yang berhasil menempuh pendidikan tinggi dan menjadi pegawai negeri atau profesional akan mengalami peningkatan status sosial secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki potensi sebagai tangga sosial yang memungkinkan mobilitas ke atas (Breen & Jonsson, 2005).

Namun demikian, tidak semua mobilitas sosial vertikal bersifat naik. Ketika seseorang mengalami penurunan status akibat kegagalan dalam pendidikan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan kebijakan ekonomi, maka mobilitas vertikal turun juga bisa terjadi. Dalam hal ini, pendidikan tetap relevan, karena kegagalan dalam memperoleh atau mempertahankan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja dapat menyebabkan penurunan posisi sosial (Brown, 2001).

Dalam mobilitas horizontal, pendidikan memberikan kemampuan kepada individu untuk berpindah antar bidang pekerjaan yang sejajar dalam strata sosial. Contohnya adalah seorang lulusan sarjana hukum yang memilih menjadi dosen daripada menjadi advokat. Kedua profesi berada dalam level sosial yang serupa, namun orientasi dan peran sosialnya berbeda. Mobilitas horizontal ini penting dalam memahami dinamika pilihan karier dan penyesuaian diri terhadap kondisi pasar kerja yang terus berubah (Kerbo, 2006).

Peran pendidikan dalam mendukung mobilitas horizontal juga tampak dalam proses spesialisasi dan sertifikasi profesional. Dengan adanya pendidikan lanjutan atau pelatihan ulang (reskilling), individu dapat berpindah dari satu bidang ke bidang lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi atau tuntutan ekonomi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pilihan karier tanpa harus mengubah kelas sosial secara signifikan.

Di Indonesia, mobilitas sosial melalui pendidikan terlihat dari meningkatnya partisipasi anak-anak dari pedesaan atau kelas menengah ke bawah dalam pendidikan tinggi. Program beasiswa seperti KIP Kuliah serta perluasan akses pendidikan tinggi melalui universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mendorong mobilitas ini. Namun, faktor geografis, ekonomi, dan budaya masih menjadi penghambat bagi sebagian masyarakat untuk menikmati manfaat mobilitas sosial melalui pendidikan secara merata (Muhaimin, 2022).

Pendidikan juga berperan dalam membentuk aspirasi mobilitas. Melalui pendidikan, individu diberi gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan masa depan, yang kemudian membentuk tujuan hidup mereka. Sekolah, guru, dan media massa yang terintegrasi dalam pendidikan formal dapat menginspirasi siswa untuk mengejar status sosial yang lebih tinggi. Akan tetapi, kesenjangan dalam kualitas pendidikan juga menciptakan ketimpangan dalam aspirasi tersebut (Hout, 1988).

Kritik terhadap peran pendidikan dalam mobilitas sosial muncul dari pendekatan reproduksi sosial yang menyoroti bagaimana pendidikan justru mempertahankan struktur kelas yang ada. Bourdieu dan Passeron (1977) menegaskan bahwa pendidikan sering kali menguntungkan mereka yang sudah

memiliki modal budaya dan sosial, sehingga alih-alih menciptakan mobilitas, pendidikan bisa menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial yang terselubung.

Untuk itu, pendidikan harus didesain sedemikian rupa agar benar-benar menjadi alat mobilitas sosial yang efektif. Perlu ada kebijakan afirmatif, pemerataan kualitas pendidikan, serta kesadaran akan pentingnya akses yang setara. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana pembebasan dan bukan penindasan (Freire, 1970).

Dengan demikian, peran pendidikan dalam mobilitas sosial sangat strategis, namun tidak otomatis. Pendidikan dapat menjadi jembatan atau penghalang bagi perubahan status sosial, tergantung pada bagaimana sistem pendidikan tersebut dirancang, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kesadaran kritis terhadap hal ini sangat penting dalam rangka membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan transformatif.

4. Peran Guru dan Kurikulum dalam Pembentukan Nilai dan Norma Sosial

Guru memegang peranan penting sebagai aktor utama dalam proses sosialisasi di lembaga pendidikan. Mereka bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi panutan dan fasilitator pembentukan nilai-nilai sosial yang akan diinternalisasi oleh peserta didik. Menurut Sadker dan Zittleman (2009), guru memiliki peran strategis dalam menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas melalui pembelajaran dan interaksi sehari-hari.

Selain menyampaikan nilai secara langsung melalui pengajaran, guru juga mentransmisikan nilai secara tidak langsung melalui keteladanan. Cara guru berpakaian, berbicara, menanggapi konflik, serta berinteraksi dengan siswa mencerminkan norma sosial yang akan ditiru oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru menjadi “agen normatif” yang memperkuat proses internalisasi norma di lingkungan sekolah (Durkheim, 1956).

Kurikulum, baik yang bersifat formal maupun tersembunyi (hidden curriculum), juga memainkan peran sentral dalam pembentukan nilai sosial. Kurikulum formal mencakup isi pelajaran yang secara eksplisit dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan kewargaan. Sedangkan kurikulum tersembunyi mencakup nilai-nilai seperti kepatuhan, kompetisi, individualisme, atau solidaritas yang tersirat dalam rutinitas dan struktur sekolah (Apple, 2004).

Melalui kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), misalnya, peserta didik diajarkan pentingnya demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Materi ini tidak hanya membentuk kesadaran politik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter pun diintegrasikan dalam kurikulum nasional sebagai upaya untuk membangun generasi yang berintegritas (Kemendikbud, 2017).

Guru juga memiliki tanggung jawab dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan latar belakang sosial peserta didik. Dengan memahami konteks sosial dan budaya siswa, guru dapat menyampaikan nilai-nilai dengan lebih kontekstual dan

bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pedagogi kritis yang menekankan pentingnya kesadaran sosial dalam proses belajar (Freire, 1970).

Kurikulum yang responsif terhadap realitas sosial dapat menjadi alat emansipatoris yang mendorong peserta didik berpikir kritis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika kurikulum terlalu normatif dan tidak memberi ruang untuk refleksi kritis, maka pendidikan bisa menjadi alat reproduksi ideologi dominan seperti yang dikritik oleh Bourdieu dan Passeron (1977).

Nilai dan norma sosial yang ditanamkan melalui guru dan kurikulum turut menentukan kualitas kohesi sosial di masyarakat. Ketika siswa terbiasa dengan nilai-nilai kerjasama, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial sejak dini, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi individu yang aktif dan produktif dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan memainkan peran preventif terhadap disintegrasi sosial (Putnam, 2000).

Dalam konteks masyarakat multikultural, guru dan kurikulum juga harus mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme dan inklusivitas. Kurikulum yang bias budaya atau diskriminatif justru dapat memperkuat prasangka dan stereotip antar kelompok. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum multikultural menjadi penting untuk membangun pemahaman lintas budaya dan menghindari konflik sosial (Banks, 2006).

Namun, tantangan dalam implementasi peran ini tidak sedikit. Ketimpangan kualitas guru, keterbatasan fasilitas, serta kurikulum yang masih bersifat top-down menjadi kendala yang membatasi efektivitas pembentukan nilai sosial di sekolah.

Diperlukan pelatihan guru yang berkelanjutan dan reformasi kurikulum yang partisipatif agar pendidikan benar-benar mampu menciptakan warga yang berkarakter kuat.

Dengan demikian, guru dan kurikulum merupakan dua elemen kunci dalam pembentukan nilai dan norma sosial di lembaga pendidikan. Sinergi antara keduanya sangat menentukan arah dan kualitas proses sosialisasi yang terjadi di sekolah, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

5. Evaluasi Efektivitas Lembaga Pendidikan dalam Membentuk Kepribadian dan Identitas Sosial Peserta Didik

Evaluasi terhadap efektivitas lembaga pendidikan dalam membentuk kepribadian dan identitas sosial peserta didik menjadi penting untuk memahami apakah tujuan sosial dari pendidikan telah tercapai. Kepribadian yang dimaksud merujuk pada struktur psikososial individu, termasuk nilai, sikap, dan perilaku sosial yang diterima secara luas dalam masyarakat. Sementara identitas sosial berkaitan dengan kesadaran individu terhadap keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dan bagaimana ia memaknainya (Tajfel & Turner, 1986).

Lembaga pendidikan efektif bila mampu menanamkan nilai-nilai universal seperti toleransi, tanggung jawab, kerja sama, dan keadilan sosial. Hal ini bisa dilihat melalui perilaku siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebuah studi oleh UNESCO (2015) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan pendekatan partisipatif lebih berhasil membentuk kepribadian prososial.

Efektivitas lembaga pendidikan juga dapat diukur dari sejauh mana siswa mampu mengembangkan identitas sosial yang inklusif. Pendidikan multikultural yang diterapkan secara sistematis mampu mendorong peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman identitas. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan OSIS dapat menjadi sarana penting dalam membangun identitas sebagai warga negara yang aktif dan toleran (Banks, 2006).

Namun, banyak tantangan yang menghambat pencapaian tersebut. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan, kurikulum yang terlalu padat akademis namun minim refleksi sosial, serta pendekatan pengajaran yang otoriter dapat melemahkan pembentukan kepribadian yang otonom dan reflektif. Dalam perspektif sosiologi kritis, hal ini menunjukkan bagaimana pendidikan kadang gagal menjadi alat pemberdayaan, dan justru memperkuat struktur sosial yang tidak adil (Giroux, 1983).

Evaluasi juga harus mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, di wilayah yang rentan terhadap konflik sosial, lembaga pendidikan perlu lebih proaktif dalam membentuk nilai toleransi dan rekonsiliasi. Implementasi program pendidikan damai (peace education) seperti yang diterapkan di beberapa wilayah pasca-konflik telah terbukti dapat memperkuat kohesi sosial antar peserta didik lintas latar belakang etnik dan agama (UNICEF, 2011).

Salah satu indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pendidikan dalam membentuk identitas sosial adalah tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan komunitas, organisasi pelajar, dan gerakan lingkungan. Semakin tinggi keterlibatan sosial siswa, semakin besar

kemungkinan mereka telah menginternalisasi nilai-nilai sosial yang diajarkan di sekolah (Putnam, 2000).

Peran guru dalam proses evaluasi ini tidak dapat diabaikan. Guru sebagai figur otoritas dan pendamping siswa dapat mengamati perkembangan kepribadian siswa secara langsung. Penilaian autentik seperti observasi sikap, jurnal refleksi, dan diskusi kelompok memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang hasil pendidikan, dibanding hanya mengandalkan tes tertulis.

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam membentuk kepribadian dan identitas sosial siswa. Ketika nilai yang diajarkan di sekolah sejalan dengan nilai yang berlaku di rumah dan masyarakat, maka proses internalisasi menjadi lebih kuat dan konsisten (Bronfenbrenner, 1979).

Dalam konteks pendidikan Indonesia, kebijakan Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk merancang pendidikan yang kontekstual dan humanistik. Jika dimanfaatkan secara maksimal, pendekatan ini berpotensi meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan dalam pembentukan kepribadian dan identitas sosial siswa yang relevan dengan kebutuhan zaman (Kemendikbudristek, 2022).

Dengan demikian, evaluasi efektivitas lembaga pendidikan tidak hanya menilai aspek kognitif peserta didik, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional mereka. Evaluasi ini harus bersifat holistik, kontekstual, dan berkelanjutan agar pendidikan mampu menjalankan fungsinya sebagai wahana transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Sosialisasi dalam konteks pendidikan terutama terjadi melalui:
 - a. Kegiatan ekonomi
 - b. Media massa
 - c. Lembaga pendidikan formal
 - d. Interaksi dalam keluarga
2. Tokoh yang menyatakan bahwa sekolah adalah jembatan antara keluarga dan masyarakat luas adalah:
 - a. Emile Durkheim
 - b. Karl Marx
 - c. Talcott Parsons
 - d. Ivan Illich
3. Konsep “hidden curriculum” merujuk pada:
 - a. Kurikulum terselubung yang belum diimplementasikan
 - b. Nilai-nilai yang disampaikan secara eksplisit dalam mata pelajaran
 - c. Pengajaran berbasis teknologi
 - d. Nilai dan norma sosial yang dipelajari tanpa disadari siswa

4. Menurut Pierre Bourdieu, sekolah memiliki peran penting dalam:
 - a. Meningkatkan kecerdasan emosional siswa
 - b. Menanamkan keterampilan kerja
 - c. Mentrasmisikan modal budaya
 - d. Menghilangkan ketimpangan sosial
5. Lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi sekunder berfungsi untuk:
 - a. Mengajarkan keterampilan rumah tangga
 - b. Melatih keterampilan kerja sejak usia dini
 - c. Membantu individu memahami dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di luar keluarga
 - d. Menyediakan hiburan bagi siswa

Essay

1. Jelaskan pengertian sosialisasi dan bagaimana lembaga pendidikan menjalankan perannya sebagai agen sosialisasi sekunder.
2. Apa yang dimaksud dengan “hidden curriculum” dan bagaimana dampaknya terhadap pembentukan kepribadian peserta didik?
3. Bandingkan peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi!
4. Bagaimana lembaga pendidikan dapat berkontribusi dalam memperkuat toleransi dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia?

5. Uraikan tantangan-tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam menjalankan peran sosialisasi secara efektif!

D. Daftar Pustaka

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: Sage.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
- Jackson, P. W. (1968). *Life in Classrooms*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Parsons, T. (1959). The School Class as a Social System. *Harvard Educational Review*, 29(4), 297–318.
- Sadker, D., & Zittleman, K. R. (2009). *Teachers, Schools, and Society: A Brief Introduction to Education*. Boston: McGraw-Hill.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Willis, P. (1977). *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. Farnborough: Saxon House.
- Suryadi, A. (2000). *Pendidikan dalam Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

BAB VI

KETIMPANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep ketimpangan pendidikan dalam masyarakat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan ketimpangan pendidikan.
3. Menganalisis peran kelas sosial, gender, dan wilayah geografis dalam menciptakan ketimpangan pendidikan.
4. Mengevaluasi teori-teori sosiologi yang relevan dengan ketimpangan pendidikan.
5. Merumuskan solusi strategis untuk mengurangi ketimpangan pendidikan melalui pendekatan sosiologis.

B. Materi Pembelajaran

1. Konsep Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan merujuk pada kondisi tidak meratanya akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok sosial tertentu. Dalam sosiologi, ketimpangan ini dipahami sebagai manifestasi dari struktur

sosial yang menghasilkan dan melanggengkan perbedaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat dilihat dari berbagai dimensi, seperti akses terhadap sekolah berkualitas, ketersediaan fasilitas, kemampuan ekonomi keluarga, hingga pengaruh budaya lokal.

Salah satu pendekatan utama dalam menganalisis ketimpangan pendidikan berasal dari teori konflik, terutama melalui pandangan Karl Marx. Menurut teori ini, sistem pendidikan tidak netral, melainkan mencerminkan dan mereproduksi struktur kelas yang ada dalam masyarakat. Pendidikan lebih menguntungkan kelas-kelas dominan karena mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meraih keberhasilan akademik, sementara kelompok marginal mengalami hambatan struktural.

Ketimpangan pendidikan juga dapat dianalisis menggunakan teori reproduksi kultural yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Dalam perspektif ini, konsep "modal budaya" menjadi kunci utama. Anak-anak dari kelas menengah dan atas memiliki modal budaya (seperti gaya bahasa, kebiasaan belajar, dan nilai-nilai pendidikan) yang selaras dengan norma-norma institusi pendidikan. Sebaliknya, anak-anak dari kelas bawah seringkali memiliki modal budaya yang tidak sesuai, sehingga mereka cenderung mengalami kegagalan akademik meskipun sistem pendidikan tampak terbuka dan meritokratis.

Selain faktor kelas, ketimpangan pendidikan juga muncul dalam konteks gender. Di banyak masyarakat, anak perempuan menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat tradisional. Hambatan ini bisa berupa beban kerja

domestik, praktik pernikahan dini, atau norma budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ketimpangan pendidikan juga berkaitan erat dengan sistem patriarki dan ketimpangan gender.

Faktor geografis turut memperparah ketimpangan pendidikan. Akses pendidikan di daerah perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan dan terpencil. Sekolah-sekolah di wilayah kota biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, tenaga pengajar yang lebih kompeten, serta lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sementara itu, sekolah di daerah tertinggal sering kekurangan tenaga pengajar, minim fasilitas, dan kurang perhatian dari pemerintah. Ketimpangan geografis ini berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan struktural yang sistemik dalam dunia pendidikan.

2. Faktor Sosial Penyebab Ketimpangan Pendidikan

Faktor sosial memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan ketimpangan pendidikan di masyarakat. Faktor-faktor ini meliputi latar belakang keluarga, status ekonomi, budaya lokal, jaringan sosial, dan norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Latar belakang keluarga, misalnya, mempengaruhi cara pandang anak terhadap pentingnya pendidikan. Anak dari keluarga berpendidikan cenderung memiliki aspirasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal.

Status ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting. Keluarga dari kelas sosial bawah sering kali menghadapi kendala dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak, mulai dari biaya sekolah, buku, hingga transportasi. Hal ini menyebabkan anak-

anak dari keluarga miskin cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah atau bahkan putus sekolah. Ketimpangan ekonomi ini bukan hanya soal uang, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan emosional dari orang tua.

Faktor budaya lokal juga berperan dalam membentuk sikap terhadap pendidikan. Di beberapa komunitas, terutama yang masih memegang teguh tradisi, pendidikan formal tidak selalu dianggap penting. Anak laki-laki mungkin lebih didorong untuk bekerja, sementara anak perempuan diarahkan pada peran domestik. Pandangan seperti ini menciptakan hambatan kultural yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meskipun secara fisik mereka memiliki akses ke sekolah.

Selain itu, jaringan sosial dan lingkungan pergaulan turut mempengaruhi aspirasi dan keberhasilan pendidikan seseorang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang menghargai pendidikan dan memiliki role model yang sukses secara akademik cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika mereka berada dalam lingkungan yang minim dukungan terhadap pendidikan, risiko untuk mengalami kegagalan akademik menjadi lebih tinggi.

Norma sosial yang berkembang juga dapat memperkuat atau menghambat partisipasi pendidikan. Misalnya, di beberapa masyarakat terdapat anggapan bahwa pendidikan hanya penting bagi laki-laki atau bahwa sekolah tidak akan membawa perubahan signifikan dalam hidup seseorang. Norma-norma ini, jika tidak ditangani melalui intervensi kebijakan dan pendidikan masyarakat, akan terus mereproduksi ketimpangan pendidikan antar **kelompok sosial**.

3. Peran Kelas Sosial, Gender, dan Wilayah Geografis dalam Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan sering kali berakar pada struktur kelas sosial dalam masyarakat. Anak-anak dari keluarga kelas menengah atas memiliki lebih banyak akses terhadap sumber daya pendidikan seperti sekolah unggulan, kursus tambahan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin harus menghadapi keterbatasan ekonomi, beban kerja rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus terpaksa bekerja membantu keluarga. Struktur kelas ini membentuk pengalaman pendidikan yang sangat berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Bowles dan Gintis (1976) dalam teori korespondensi antara sekolah dan struktur kelas.

Kelas sosial juga berpengaruh terhadap harapan dan aspirasi pendidikan. Orang tua dari kelas atas cenderung mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan orang tua dari kelas bawah mungkin lebih realistis atau pesimis terhadap prospek pendidikan anak mereka. Perbedaan ini berdampak pada motivasi, kepercayaan diri, dan performa akademik siswa. Hal ini juga diperkuat oleh kajian sosiologi pendidikan oleh Paul Willis (1977) yang menunjukkan bagaimana budaya kelas pekerja membentuk sikap resistensi terhadap norma-norma pendidikan formal.

Selain kelas sosial, gender juga merupakan faktor penting dalam ketimpangan pendidikan. Di berbagai wilayah, masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan. Menurut UNESCO (2022), jutaan anak perempuan di dunia, terutama di negara berkembang, masih mengalami

hambatan untuk bersekolah karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini mencerminkan adanya sistem patriarki yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik, termasuk pendidikan.

Ketimpangan gender dalam pendidikan juga tampak dalam kurikulum dan representasi perempuan di buku pelajaran. Banyak studi menunjukkan bahwa perempuan sering kali direpresentasikan dalam peran tradisional, seperti ibu rumah tangga atau pengasuh, sementara laki-laki digambarkan sebagai pemimpin atau profesional. Representasi semacam ini memperkuat stereotip gender dan dapat mempengaruhi aspirasi karier anak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi kurikulum yang sensitif gender agar proses pendidikan menjadi lebih setara.

Wilayah geografis merupakan faktor lain yang memperdalam ketimpangan pendidikan. Di Indonesia, misalnya, ada kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas pendidikan. Sekolah di kota cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih terlatih, serta akses terhadap teknologi. Di sisi lain, sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan guru, keterbatasan sarana, dan sulit dijangkau oleh pengawas atau pelatihan profesional.

Salah satu studi oleh SMERU Research Institute (2018) menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah timur Indonesia memiliki angka partisipasi sekolah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak di Pulau Jawa. Faktor infrastruktur, kemiskinan, dan kurangnya kebijakan afirmatif menjadi penyebab utama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa

letak geografis bukan hanya soal jarak fisik, melainkan juga soal ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya pendidikan.

Interaksi antara kelas sosial, gender, dan wilayah geografis sering kali bersifat saling memperkuat. Misalnya, seorang anak perempuan dari keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan akan menghadapi tantangan ganda atau bahkan tripel dalam mengakses pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan analisis interseksional sangat penting dalam memahami dinamika ketimpangan pendidikan secara menyeluruh.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan sebenarnya dapat menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan geografis, namun implementasinya masih belum merata. Di banyak daerah, infrastruktur teknologi belum memadai, dan pelatihan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran masih sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa solusi teknologi harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis. Di beberapa wilayah terpencil, pendidikan belum dianggap sebagai investasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan masyarakat dan pendekatan kultural dalam membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan, khususnya di komunitas marjinal.

Untuk mengatasi ketimpangan yang bersifat multidimensional ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Program-program afirmatif harus dirancang secara partisipatif dan berbasis data untuk menjangkau kelompok-kelompok yang

paling rentan. Pendidikan yang setara hanya dapat dicapai jika seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya bersama.

4. Teori-Teori Sosiologi Terkait Ketimpangan Pendidikan

Teori-teori dalam sosiologi memberikan kerangka analitis untuk memahami ketimpangan pendidikan. Salah satu teori penting adalah teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim memandang pendidikan sebagai mekanisme yang memelihara solidaritas sosial dan integrasi masyarakat. Namun, kritik terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan juga memperkuat status quo dan meneguhkan ketimpangan sosial yang sudah ada.

Dalam konteks ini, teori konflik menjadi alternatif penting dalam menjelaskan ketimpangan pendidikan. Karl Marx dan penerusnya melihat pendidikan sebagai alat ideologis kelas dominan untuk mempertahankan hegemoni dan struktur kelas. Bowles dan Gintis (1976), dalam karyanya *Schooling in Capitalist America*, mengemukakan bahwa sekolah mencerminkan struktur tempat kerja kapitalis dan memperkuat ketimpangan ekonomi melalui sistem nilai dan disiplin yang diajarkan di sekolah.

Pierre Bourdieu (1977) menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui konsep *habitus*, *modal budaya*, dan *reproduksi sosial*. Menurut Bourdieu, siswa dari latar belakang kelas menengah atas memiliki *modal budaya* yang lebih selaras dengan ekspektasi institusi pendidikan, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Sistem pendidikan, menurutnya, tidak netral, melainkan mereproduksi ketimpangan kelas melalui legitimasi akademik yang tampak adil padahal bias.

Teori reproduksi sosial Bourdieu memperlihatkan bagaimana kurikulum, bahasa pengantar, dan metode evaluasi dalam pendidikan cenderung menguntungkan kelompok dominan. Hal ini mengakibatkan siswa dari kelompok subordinat harus bekerja dua kali lebih keras untuk memenuhi standar yang dirancang bukan untuk mereka. Reproduksi ketimpangan ini berjalan secara halus dan tidak disadari, menjadikan sistem pendidikan tampak objektif padahal sangat selektif secara sosial.

Selain teori konflik dan reproduksi sosial, teori interaksionisme simbolik juga menawarkan perspektif mikro terhadap ketimpangan pendidikan. Melalui penelitian seperti yang dilakukan Howard Becker (1963), ditemukan bahwa label yang diberikan oleh guru terhadap siswa mempengaruhi perilaku dan pencapaian akademik siswa. Label seperti “murid pintar” atau “murid malas” dapat membentuk self-fulfilling prophecy yang memperkuat ketimpangan di dalam kelas.

Dalam perspektif interaksionisme, penting untuk memahami dinamika interaksi di ruang kelas, termasuk bagaimana harapan guru dan interaksi antar siswa menciptakan struktur sosial mikro yang mencerminkan ketimpangan sosial makro. Kajian ini membantu menjelaskan mengapa siswa dari latar belakang sosial tertentu lebih sering mengalami diskriminasi atau eksklusi dalam proses belajar mengajar.

Teori feminis juga memberikan kontribusi besar dalam menganalisis ketimpangan pendidikan, khususnya terkait isu gender. Tokoh seperti Ann Oakley dan bell hooks menyoroti bagaimana institusi pendidikan mereproduksi peran gender tradisional dan mengabaikan pengalaman perempuan dalam

kurikulum. Teori feminis menyerukan perlunya pendidikan yang lebih inklusif dan sadar gender untuk mengatasi dominasi patriarki dalam dunia pendidikan.

Perspektif postmodern juga mengajak untuk lebih kritis terhadap narasi tunggal dalam pendidikan. Dalam pandangan ini, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari diskursus kekuasaan, bahasa, dan konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Michel Foucault, misalnya, melihat pendidikan sebagai ruang produksi pengetahuan yang juga menjadi alat kontrol sosial melalui mekanisme evaluasi, pengawasan, dan pelabelan.

Dengan memanfaatkan berbagai teori ini, kita dapat memahami bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan distribusi sumber daya, tetapi juga masalah struktural, simbolik, dan kultural. Oleh karena itu, solusi terhadap ketimpangan pendidikan harus bersifat multidimensional dan berakar pada pemahaman sosiologis yang mendalam.

Dalam praktiknya, integrasi teori-teori ini membantu pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat sipil untuk merancang intervensi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendidikan yang setara tidak cukup hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga membutuhkan transformasi struktural dalam sistem sosial yang lebih luas.

5. Strategi Mengurangi Ketimpangan Pendidikan

Mengurangi ketimpangan pendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari aspek kebijakan pemerintah, institusi pendidikan, maupun partisipasi masyarakat sipil. Salah satu strategi utama adalah memperkuat kebijakan afirmatif yang memberikan akses lebih besar kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan, seperti beasiswa bagi siswa dari

keluarga tidak mampu dan program zonasi yang adil (UNESCO, 2020).

Pemerintah dapat merancang sistem anggaran pendidikan yang berbasis kebutuhan (*needs-based funding*), bukan semata-mata berdasarkan jumlah siswa atau wilayah. Hal ini memungkinkan sekolah-sekolah di daerah terpencil atau miskin mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas (OECD, 2018).

Penguatan kapasitas guru juga menjadi kunci penting. Pelatihan guru dalam metode pembelajaran inklusif, kesadaran gender, dan keberagaman budaya dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang lebih adil. Guru juga perlu diberdayakan untuk memahami latar belakang sosial siswa dan berperan aktif dalam mengurangi stigma serta diskriminasi di ruang kelas (Banks, 2008).

Pendidikan nonformal dan komunitas belajar juga bisa dijadikan sarana untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terakses oleh pendidikan formal. Program literasi komunitas, pelatihan keterampilan vokasional, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dapat membantu menjembatani kesenjangan pendidikan (Freire, 1970).

Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam pendidikan harus dirancang dengan prinsip keadilan digital. Pemerataan akses terhadap internet dan perangkat digital sangat penting agar transformasi digital tidak malah memperlebar ketimpangan yang sudah ada. Program seperti pembagian tablet gratis dan jaringan internet sekolah gratis merupakan contoh konkret dari intervensi ini (World Bank, 2021).

Perlu juga diterapkan sistem evaluasi dan pemantauan ketimpangan pendidikan secara berkala, melalui survei pendidikan nasional dan pelaporan publik. Dengan data yang akurat dan transparan, kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap ketimpangan dapat dibangun (UNDP, 2019).

Kerjasama lintas sektor, seperti antara lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal, sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal (Sen, 1999).

Perubahan budaya pendidikan juga menjadi elemen penting. Sekolah harus menjadi ruang yang demokratis, inklusif, dan mendukung keberagaman. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang merefleksikan nilai-nilai multikulturalisme dan kesetaraan sosial (Banks & McGee Banks, 2010).

Dalam jangka panjang, mengurangi ketimpangan pendidikan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar dan sarana pemberdayaan sosial. Kesetaraan dalam pendidikan adalah fondasi bagi mobilitas sosial dan pembangunan manusia secara menyeluruh (Sen, 1999).

Akhirnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang adil dan setara harus ditumbuhkan secara kolektif. Perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika masyarakat ikut terlibat aktif dalam proses transformasi pendidikan, baik melalui advokasi kebijakan maupun tindakan langsung di tingkat lokal.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Ketimpangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai:
 - a. Persaingan antara sekolah negeri dan swasta
 - b. Perbedaan akses dan hasil pendidikan antar kelompok sosial
 - c. Tingginya angka partisipasi sekolah dasar
 - d. Ketergantungan siswa terhadap teknologi
2. Faktor utama yang memengaruhi ketimpangan pendidikan adalah:
 - a. Perkembangan teknologi
 - b. Keberadaan kurikulum nasional
 - c. Faktor sosial dan ekonomi
 - d. Keberadaan guru profesional
3. Teori reproduksi sosial dalam konteks pendidikan dikemukakan oleh:
 - a. Max Weber
 - b. Emile Durkheim
 - c. Pierre Bourdieu
 - d. Talcott Parsons
4. Strategi afirmatif dalam pendidikan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan standar nasional ujian
 - b. Memberi peluang lebih besar kepada kelompok marginal
 - c. Mengurangi beban guru dalam mengajar
 - d. Mengembangkan teknologi pembelajaran

5. Pendidikan berbasis komunitas bertujuan untuk:
 - a. Menyederhanakan kurikulum
 - b. Memperkuat nilai-nilai lokal dan menjangkau masyarakat marginal
 - c. Meningkatkan jumlah guru PNS
 - d. Menstandarisasi pengajaran di kota besar

Essay

1. Jelaskan dengan contoh bagaimana kelas sosial memengaruhi akses dan kualitas pendidikan seseorang!
2. Uraikan peran teori Pierre Bourdieu dalam menjelaskan ketimpangan pendidikan!
3. Mengapa integrasi teknologi bisa memperparah ketimpangan pendidikan jika tidak dikelola secara adil? Jelaskan!
4. Bagaimana pendekatan multikulturalisme dapat digunakan untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil?
5. Rancanglah satu program atau strategi yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan!

D. Daftar Pustaka

- Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson Education.
- Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (2010). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. John Wiley & Sons.
- Bourdieu, P. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage Publications.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- OECD. (2018). *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*. OECD Publishing.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- UNDP. (2019). *Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank Group.

BAB VII

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MOBILITAS SOSIAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep mobilitas sosial dan jenis-jenisnya.
2. Menganalisis hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial.
4. Mengevaluasi peran institusi pendidikan formal dan non-formal dalam mobilitas sosial.
5. Menyusun strategi kebijakan pendidikan untuk mendorong keadilan sosial melalui mobilitas vertikal.

B. Materi Pembelajaran

1. Konsep Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan konsep penting dalam sosiologi yang merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya dalam struktur sosial. Menurut Pitirim Sorokin (1959), mobilitas sosial

dapat bersifat vertikal (naik atau turun dalam hierarki sosial) maupun horizontal (perpindahan dalam posisi sosial yang setara). Mobilitas ini mencerminkan dinamika struktur sosial suatu masyarakat dan berperan penting dalam menjamin fleksibilitas sosial.

Jenis-jenis mobilitas sosial meliputi mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun, mobilitas horizontal, serta mobilitas antargenerasi dan intragenerasi. Mobilitas antargenerasi mengacu pada perubahan status sosial antara generasi yang berbeda, misalnya antara orang tua dan anak. Sedangkan mobilitas intragenerasi merujuk pada perubahan status sosial yang terjadi dalam kehidupan individu itu sendiri (Giddens, 2006).

Mobilitas sosial biasanya diukur melalui indikator seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, serta akses terhadap sumber daya sosial lainnya. Pendidikan merupakan salah satu variabel kunci dalam mobilitas sosial karena berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kualifikasi yang meningkatkan peluang kerja dan pendapatan seseorang (Breen & Jonsson, 2005).

Dalam masyarakat terbuka, mobilitas sosial dianggap sebagai peluang yang adil bagi semua orang untuk naik dalam tangga sosial berdasarkan kemampuan dan usaha. Namun, dalam kenyataannya, mobilitas sering kali dibatasi oleh struktur sosial seperti kelas sosial, ras, jenis kelamin, dan lokasi geografis yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan sumber daya lainnya (Kerbo, 2000).

Konsep meritokrasi juga sering dikaitkan dengan mobilitas sosial, yaitu keyakinan bahwa pencapaian sosial

seseorang harus ditentukan oleh kemampuan dan usahanya, bukan oleh warisan atau latar belakang sosial. Sistem pendidikan yang meritokratis dianggap sebagai alat utama untuk mendukung mobilitas sosial di masyarakat modern (Young, 1958).

Namun demikian, banyak studi menunjukkan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya netral. Sebaliknya, sistem pendidikan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial melalui kurikulum tersembunyi, akses yang tidak merata, dan ekspektasi sosial yang berbeda terhadap peserta didik dari berbagai latar belakang (Bowles & Gintis, 1976).

Mobilitas sosial juga memiliki dampak terhadap kohesi sosial. Tingkat mobilitas yang tinggi dapat meningkatkan harapan dan motivasi individu untuk mencapai status yang lebih tinggi, sementara tingkat mobilitas yang rendah dapat menimbulkan frustrasi, ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem sosial (Putnam, 2000).

Dalam konteks globalisasi, mobilitas sosial menjadi semakin kompleks. Mobilitas tidak hanya terbatas dalam satu negara, tetapi juga mencakup migrasi internasional untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Hal ini memperluas spektrum mobilitas sosial namun juga menciptakan ketimpangan baru antara negara maju dan negara berkembang (Castles & Miller, 2009).

Dengan demikian, memahami konsep mobilitas sosial sangat penting dalam sosiologi pendidikan karena pendidikan merupakan instrumen utama yang dipromosikan negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mobil secara sosial. Akan tetapi, efektivitas pendidikan dalam mencapai tujuan

tersebut bergantung pada sejauh mana akses terhadap pendidikan berkualitas tersedia secara merata.

2. Hubungan Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Pendidikan sering dianggap sebagai alat utama dalam menciptakan dan mempercepat mobilitas sosial. Hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial sudah lama dikaji dalam kajian sosiologi, dengan pendidikan dilihat sebagai sarana strategis untuk meningkatkan status sosial ekonomi individu. Pendidikan formal menyediakan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan status sosial seseorang (Halsey, Heath, & Ridge, 1980).

Menurut Blau dan Duncan (1967), dalam model mobilitas status, pendidikan menjadi variabel penghubung antara latar belakang sosial seseorang dengan status pekerjaan yang dicapainya. Artinya, meskipun individu berasal dari latar belakang ekonomi rendah, mereka masih memiliki peluang untuk mencapai status tinggi melalui pencapaian pendidikan. Dalam kerangka ini, pendidikan bertindak sebagai "mobilitas elevator" yang membawa individu ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial tidak selalu linier dan adil. Ketimpangan dalam sistem pendidikan, seperti perbedaan kualitas antar sekolah, akses terhadap pendidikan tinggi, serta biaya pendidikan, menjadi hambatan struktural yang membatasi peran pendidikan dalam menciptakan mobilitas sosial (Bourdieu & Passeron, 1990). Anak-anak dari kelas sosial bawah sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas

karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan kultural.

Bourdieu menekankan pentingnya modal budaya dalam menjelaskan ketimpangan dalam sistem pendidikan. Ia berpendapat bahwa siswa dari kelas atas memiliki keunggulan dalam sistem pendidikan karena mereka memiliki habitus dan modal budaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh institusi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak netral tetapi berfungsi untuk mereproduksi struktur kelas yang ada.

Meski demikian, pendidikan tetap memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial jika diselenggarakan secara adil dan merata. Kebijakan afirmatif, peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa, dan pemerataan fasilitas pendidikan merupakan beberapa upaya untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi alat mobilitas sosial yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Mobilitas Sosial melalui Pendidikan

Mobilitas sosial melalui pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menentukan peluang individu untuk bergerak ke posisi sosial yang lebih tinggi. Faktor pertama yang sangat dominan adalah latar belakang keluarga. Keluarga dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anaknya untuk belajar dan berkembang. Coleman (1988) menekankan bahwa modal sosial keluarga, seperti dukungan emosional dan sumber daya pendidikan, memiliki dampak besar terhadap

pencapaian pendidikan anak. Hal ini menunjukkan adanya pola reproduksi sosial dari generasi ke generasi.

Selain itu, modal budaya yang dimiliki oleh keluarga juga berperan penting. Bourdieu dan Passeron (1990) menjelaskan bahwa nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan keluarga – seperti apresiasi terhadap pendidikan dan bahasa yang digunakan sehari-hari – sangat menentukan kemampuan anak-anak untuk menyesuaikan diri dan berhasil dalam sistem pendidikan yang formal. Anak-anak dari kelas sosial atas biasanya memiliki modal budaya yang lebih sesuai dengan tuntutan sekolah dibandingkan dengan anak-anak dari kelas bawah.

Faktor kedua adalah kualitas dan akses terhadap lembaga pendidikan. Sekolah dengan fasilitas yang lengkap, guru yang berkualitas, serta kurikulum yang relevan memungkinkan siswa untuk memperoleh pembelajaran yang maksimal (UNESCO, 2020). Sebaliknya, ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, maupun antara sekolah negeri dan swasta, menyebabkan disparitas yang signifikan dalam hasil pendidikan. Anak-anak dari daerah miskin atau terpencil sering kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi yang menjadi pintu gerbang mobilitas sosial.

Ketiga, peran kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam membuka akses pendidikan yang merata dan adil. Negara dapat mengimplementasikan program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan kebijakan afirmatif untuk kelompok marginal guna mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan (Esping-Andersen, 1999). Contoh negara-negara Nordik menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan yang

inklusif dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan kelas.

Keempat, lingkungan sosial dan budaya tempat tinggal turut mempengaruhi motivasi dan kesempatan belajar. Lingkungan yang mendukung pendidikan, seperti adanya tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan budaya membaca yang kuat, akan mendorong individu untuk berprestasi. Studi oleh Stevenson dan Stigler (1992) di negara-negara Asia Timur mengungkapkan bahwa budaya yang menekankan kerja keras dan penghargaan terhadap pendidikan secara signifikan meningkatkan prestasi akademik siswa.

Faktor kelima adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Meski sudah banyak kemajuan, di beberapa wilayah perempuan masih menghadapi diskriminasi dan hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Kesenjangan ini berpengaruh terhadap mobilitas sosial karena pendidikan adalah salah satu sarana utama untuk keluar dari kemiskinan dan marginalisasi (UNESCO, 2021).

Selanjutnya, pengaruh teknologi dan media dalam pendidikan juga semakin besar. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan akses ke sumber belajar yang lebih luas melalui platform digital, pembelajaran daring, dan sumber daya multimedia. Namun, kesenjangan digital masih menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat kurang mampu untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal (World Bank, 2022).

Selain itu, kondisi psikologis dan motivasi individu menjadi faktor internal yang menentukan keberhasilan pendidikan. Lingkungan yang penuh tekanan, diskriminasi, atau kurang dukungan sosial dapat menurunkan motivasi belajar

siswa (Eccles & Roeser, 2011). Sebaliknya, dorongan dari keluarga dan sekolah yang positif meningkatkan semangat belajar yang pada akhirnya memperbesar peluang mobilitas sosial.

Faktor berikutnya adalah struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja memudahkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dengan status sosial yang lebih baik. Namun, mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar sering terjadi, sehingga lulusan sulit menaikkan status sosialnya walaupun telah menempuh pendidikan tinggi (Brown & Hesketh, 2004).

Terakhir, faktor politik dan stabilitas sosial turut menentukan efektivitas pendidikan sebagai alat mobilitas sosial. Kondisi politik yang stabil dan pemerintahan yang berkomitmen pada pemerataan pendidikan akan lebih mampu menghadirkan peluang mobilitas sosial yang luas. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dan konflik sosial dapat menghambat akses pendidikan dan memperdalam kesenjangan sosial (UNDP, 2019).

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut secara komprehensif, pendidikan dapat berfungsi secara optimal sebagai alat untuk mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.

4. Peran Institusi Pendidikan Formal dan Non-formal dalam Mobilitas Sosial

Institusi pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi memegang peranan sentral dalam mendorong mobilitas sosial. Sekolah formal menyediakan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk

memasuki dunia kerja dan berpartisipasi dalam masyarakat (Durkheim, 1956). Pendidikan formal dianggap sebagai jalur utama yang sistematis dan diakui secara resmi dalam proses mobilitas sosial.

Pendidikan formal memungkinkan sertifikasi dan pengakuan resmi atas kompetensi seseorang, yang sangat penting dalam sistem meritokrasi modern. Sertifikat, ijazah, dan gelar akademik menjadi alat legitimasi yang memudahkan akses ke pekerjaan yang lebih baik dan peningkatan status sosial (Collins, 1979). Dengan demikian, institusi formal berfungsi sebagai filter yang menyeleksi dan menempatkan individu dalam posisi sosial tertentu berdasarkan pencapaian akademik.

Selain itu, institusi pendidikan formal juga berperan dalam sosialisasi nilai dan norma masyarakat yang mendukung kohesi sosial dan integrasi sosial. Melalui pendidikan, individu belajar tentang aturan, tanggung jawab, dan peran sosial yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat (Parsons, 1959). Dengan demikian, pendidikan formal tidak hanya mengembangkan aspek kognitif tetapi juga membentuk karakter dan sikap sosial.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa institusi formal sering kali juga mereproduksi ketimpangan sosial. Bowles dan Gintis (1976) mengkritik sistem pendidikan formal sebagai alat reproduksi struktur kelas dengan menunjukkan bagaimana sekolah menyesuaikan anak didik untuk menerima posisi sosial yang berbeda, tergantung pada latar belakang sosial mereka. Hal ini terjadi melalui kurikulum tersembunyi dan ekspektasi yang berbeda terhadap siswa dari kelas sosial yang berbeda.

Di sisi lain, pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan pendidikan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mobilitas sosial, terutama bagi mereka yang sudah berada di luar sistem pendidikan formal atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi secara fleksibel. Pendidikan non-formal sering kali lebih mudah diakses oleh kelompok marginal dan memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja (Coombs, 1985).

Pendidikan non-formal juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi dalam pendidikan formal, memberikan peluang belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan meningkatkan daya saing individu di pasar tenaga kerja (UNESCO, 2015). Program-program pelatihan dan pendidikan kejuruan memberikan jalan alternatif untuk mobilitas sosial vertikal, terutama bagi mereka yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Institusi pendidikan informal, seperti keluarga dan komunitas, juga berkontribusi dalam proses pembelajaran sosial dan budaya yang mendukung mobilitas sosial. Keluarga sebagai agen pendidikan pertama dan utama memberikan dasar nilai dan aspirasi pendidikan yang berpengaruh besar terhadap motivasi dan prestasi belajar anak (Lareau, 2003). Komunitas yang mendukung pendidikan dapat menyediakan jaringan sosial dan sumber daya yang membantu individu mengatasi hambatan dalam pendidikan formal.

Peran lembaga pendidikan formal dan non-formal harus dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan yang saling melengkapi. Keduanya berkontribusi dalam menyediakan peluang yang lebih luas bagi individu untuk meningkatkan

kualitas hidup dan status sosialnya melalui berbagai jalur pembelajaran dan pengembangan diri (Desjardins, 2017).

Akhirnya, efektivitas lembaga pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial sangat bergantung pada pemerataan akses, kualitas pendidikan, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan yang mendukung inklusivitas dan penguatan pendidikan non-formal sangat penting untuk memastikan pendidikan berfungsi sebagai alat keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan

5. Strategi Kebijakan Pendidikan untuk Mendorong Keadilan Sosial melalui Mobilitas Vertikal

Strategi kebijakan pendidikan merupakan kunci dalam mewujudkan mobilitas sosial vertikal dan keadilan sosial. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal yang selama ini kurang terlayani. Salah satu strategi penting adalah penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi (OECD, 2018).

Kebijakan afirmatif seperti beasiswa, program subsidi pendidikan, dan kebijakan kuota menjadi alat penting untuk mengatasi ketimpangan akses dan meningkatkan peluang pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi (Carnoy, 2014). Dengan demikian, kebijakan ini dapat memperbaiki ketidakseimbangan dan membuka peluang bagi mobilitas vertikal melalui pendidikan.

Selain itu, reformasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja juga sangat penting. Kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial

dan ekonomi akan meningkatkan kompetensi lulusan sehingga mereka lebih siap bersaing dan memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya mendorong mobilitas sosial (Apple, 2013).

Peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan. Guru yang kompeten dan terlatih dengan baik dapat memberikan pembelajaran yang efektif, memotivasi siswa, dan membantu mereka mengatasi hambatan belajar yang mungkin muncul akibat latar belakang sosial yang kurang mendukung (Hanushek & Woessmann, 2015).

Penguatan pendidikan non-formal dan pendidikan vokasi juga menjadi bagian dari strategi kebijakan yang penting. Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi (UNESCO, 2016).

Selain itu, kebijakan pendidikan harus juga mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas dan daerah tertinggal dengan pendekatan khusus yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi diskriminasi dan ketimpangan yang makin memperlebar jurang sosial (Banks, 2008).

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga menjadi strategi modern yang efektif untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi daerah terpencil dan kelompok yang tidak bisa mengakses pendidikan formal secara langsung. Pembelajaran daring dan blended learning dapat menjadi solusi

efektif untuk menjangkau lebih banyak peserta didik (Selwyn, 2016).

Kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan sosial harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek pendidikan dengan kebijakan sosial lainnya seperti kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan lintas sektor ini akan memperkuat dampak pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan struktural (Sen, 1999).

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan dalam meningkatkan mobilitas sosial (World Bank, 2018).

Akhirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini. Masyarakat yang terlibat akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan, adil, dan dapat dijalankan secara berkelanjutan demi tercapainya keadilan sosial dan mobilitas sosial yang lebih baik

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal?
 - a. Perpindahan posisi sosial dalam tingkat yang sama
 - b. Perpindahan naik atau turun dalam hierarki sosial
 - c. Perpindahan antar kelompok sosial yang berbeda
 - d. Perpindahan status sosial antar generasi
2. Menurut Blau dan Duncan (1967), peran pendidikan dalam mobilitas sosial adalah sebagai...
 - a. Faktor penentu warisan sosial
 - b. Variabel penghubung antara latar belakang sosial dan status pekerjaan
 - c. Penyebab reproduksi ketimpangan sosial
 - d. Alat untuk mempertahankan status sosial
3. Kebijakan afirmatif dalam pendidikan bertujuan untuk...
 - a. Meningkatkan persaingan antar siswa
 - b. Membatasi akses pendidikan untuk kelompok tertentu
 - c. Mengurangi ketimpangan akses pendidikan bagi kelompok kurang beruntung
 - d. Menghapuskan pendidikan vokasi

4. Manakah berikut ini yang bukan termasuk strategi kebijakan pendidikan untuk mendorong keadilan sosial?
 - a. Penyediaan fasilitas pendidikan inklusif
 - b. Reformasi kurikulum yang relevan
 - c. Pembatasan teknologi dalam pendidikan
 - d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik
5. Peran teknologi dalam pendidikan dalam konteks mobilitas sosial adalah...
 - a. Menggantikan peran guru sepenuhnya
 - b. Memperluas akses pendidikan terutama di daerah terpencil
 - c. Membatasi interaksi sosial dalam pendidikan
 - d. Menyebabkan ketimpangan pendidikan semakin parah

Essay

1. Jelaskan pengertian mobilitas sosial vertikal dan berikan contoh dalam konteks pendidikan!
2. Bagaimana hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial menurut perspektif sosiologi? Sertakan pendapat para ahli!
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendidikan dalam mendorong mobilitas sosial? Jelaskan secara rinci!
4. Diskusikan bagaimana institusi pendidikan formal dan non-formal dapat berperan dalam meningkatkan mobilitas sosial!

5. Uraikan strategi kebijakan pendidikan yang efektif untuk mendorong keadilan sosial dan mobilitas vertikal di masyarakat!

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2013). *Education and Power* (3rd ed.). Routledge.
- Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education* (4th ed.). Pearson.
- Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). *The American Occupational Structure*. Wiley.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America*. Basic Books.
- Breen, R., & Jonsson, J. O. (2005). Inequality of opportunity in comparative perspective: Recent research on educational attainment and social mobility. *Annual Review of Sociology*, 31, 223–243.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage.
- Carnoy, M. (2014). *Education for All? The Promise of Equity*. Stanford University Press.
- Castles, S., & Miller, M. J. (2009). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.
- Giddens, A. (2006). *Sociology* (5th ed.). Polity Press.
- Halsey, A. H., Heath, A. F., & Ridge, J. M. (1980). *Origins and Destinations: Family, Class, and Education in Modern Britain*. Oxford University Press.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. MIT Press.

- Kerbo, H. R. (2000). *Social Stratification and Inequality: Class Conflict in Historical and Comparative Perspective*. McGraw-Hill.
- OECD. (2018). *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*. OECD Publishing.
- Pitirim, A. Sorokin. (1959). *Social and Cultural Mobility*. Free Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Selwyn, N. (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Academic.
- UNESCO. (2016). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*.

BAB VIII

STUDI KASUS DINAMIKA SOSIAL DI SEKOLAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan kehidupan sosial di lingkungan sekolah berdasarkan studi etnografi.
2. Menganalisis relasi sosial antara siswa, siswa-guru, dan budaya sekolah.
3. Mengidentifikasi bentuk konflik, solidaritas, dan dinamika kekuasaan di sekolah.
4. Mengkaji pengaruh latar belakang sosial siswa terhadap pengalaman belajar di sekolah.
5. Mengaplikasikan konsep sosiologi pendidikan dalam studi kasus nyata di sekolah.

B. Materi Pembelajaran

1. Studi Etnografi Singkat Kehidupan Sosial di Sekolah

Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang kompleks. Studi etnografi dalam sosiologi pendidikan berupaya memahami kehidupan sosial di

sekolah secara mendalam dengan metode observasi partisipatif, wawancara, dan analisis kontekstual (Hammersley & Atkinson, 2007). Melalui pendekatan ini, kita dapat menangkap bagaimana norma, nilai, dan budaya berkembang dan diinternalisasi oleh para siswa dan guru.

Dalam studi etnografi, sekolah dipandang sebagai mikrokosmos masyarakat yang mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Sekolah memuat beragam kelompok sosial yang berbeda, dengan stratifikasi sosial berdasarkan kelas, jenis kelamin, etnis, dan prestasi akademik (Willis, 1977). Pemahaman tentang interaksi ini membantu menjelaskan bagaimana identitas sosial dan status dibangun dalam lingkungan sekolah.

Salah satu fokus utama adalah bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain, membentuk kelompok pertemanan dan subkultur yang memiliki norma dan nilai tersendiri. Subkultur siswa bisa saja mendukung atau menentang budaya resmi sekolah, misalnya dalam cara berpakaian, bahasa, atau sikap terhadap otoritas (Mac an Ghaill, 1992). Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara struktur formal dan praktik sosial informal di sekolah.

Guru sebagai agen pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk suasana belajar dan budaya sekolah. Namun, relasi guru dan siswa tidak selalu hierarkis dan homogen. Guru juga memiliki latar belakang sosial dan pandangan yang memengaruhi cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa (Apple, 2013). Studi etnografi menggali bagaimana hubungan ini dapat membentuk pengalaman belajar siswa.

Lebih lanjut, sekolah juga menjadi arena dimana norma dan nilai sosial dipertaruhkan dan dikonstruksi ulang. Proses sosialisasi di sekolah melibatkan internalisasi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat, sekaligus memungkinkan terjadinya resistensi dan negosiasi dari siswa (Ball, 2003). Ini membuat sekolah menjadi ruang yang dinamis, bukan hanya institusi yang statis.

Kehidupan sosial di sekolah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pendidikan, tekanan dari orang tua, dan lingkungan sosial sekitar. Studi etnografi membuka wawasan tentang bagaimana kebijakan formal diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana pengaruh sosial di luar sekolah merambah ke lingkungan pendidikan (Lareau, 2011).

Dengan pendekatan kualitatif ini, kita dapat menangkap suara dan pengalaman siswa yang seringkali terpinggirkan dalam data kuantitatif. Hal ini penting untuk memahami kesenjangan pendidikan dan mencari solusi yang relevan dengan konteks sosial siswa (Mills, 2000).

Penelitian etnografi di sekolah juga menunjukkan bahwa keberagaman sosial, seperti perbedaan kelas, etnis, dan gender, tidak hanya membentuk pengalaman belajar tetapi juga hubungan sosial di antara para siswa dan guru. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesenjangan maupun peluang solidaritas (Carter, 2005).

Akhirnya, studi etnografi kehidupan sosial di sekolah menegaskan pentingnya memahami sekolah sebagai ruang sosial yang kompleks, di mana proses pendidikan dan dinamika sosial berjalan bersamaan. Pemahaman ini menjadi landasan

penting bagi pengembangan kebijakan **dan praktik pendidikan yang inklusif dan responsif sosial**.

2. Relasi Antar Siswa, Siswa-Guru, dan Budaya Sekolah

Relasi antar siswa di sekolah membentuk jaringan sosial yang kompleks yang dapat berupa persahabatan, persaingan, maupun kelompok eksklusif. Siswa cenderung membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan minat, latar belakang sosial, atau nilai yang dianut (Coleman, 1961). Dalam konteks ini, dinamika kekuasaan dan pengaruh sosial sangat penting dalam menentukan posisi dan status sosial dalam kelompok tersebut.

Hubungan antara siswa dan guru juga menjadi salah satu aspek kunci dalam kehidupan sekolah. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur otoritas yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa (Foucault, 1977). Model interaksi yang efektif antara guru dan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memperkuat motivasi belajar.

Budaya sekolah terbentuk dari kombinasi norma, nilai, kebiasaan, dan ritual yang dijalankan bersama oleh semua anggota sekolah. Budaya ini menjadi kerangka kerja yang mengatur perilaku dan interaksi sosial di lingkungan pendidikan (Deal & Kennedy, 1982). Budaya sekolah yang inklusif dan suportif sangat berperan dalam membangun rasa belonging dan solidaritas di antara siswa.

Namun, dalam praktiknya, budaya sekolah sering kali merefleksikan dan mereproduksi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat luas. Misalnya, nilai dan norma yang dianut sekolah biasanya mencerminkan kelas sosial dominan, sehingga siswa

dari latar belakang sosial yang berbeda mungkin merasa teralienasi atau tidak dihargai (Giroux, 1983).

Relasi antar siswa juga dapat menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi perbedaan kelas sosial, etnis, atau nilai budaya. Konflik ini bisa berupa bullying, diskriminasi, atau pengucilan sosial. Namun, konflik tersebut juga dapat menjadi sumber pembelajaran sosial yang penting jika dikelola dengan baik (Johnson & Johnson, 1995).

Interaksi siswa-guru dipengaruhi oleh harapan dan persepsi masing-masing pihak. Guru sering kali membawa stereotip dan bias yang dapat memengaruhi perlakuan mereka terhadap siswa tertentu, terutama siswa dari kelompok sosial marginal (Tatum, 1997). Hal ini berdampak pada pengalaman belajar dan pencapaian akademik siswa tersebut.

Budaya sekolah yang sehat juga mengedepankan nilai-nilai kolaborasi dan penghargaan terhadap keberagaman. Sekolah yang mampu mengintegrasikan berbagai latar belakang sosial siswa dan memfasilitasi interaksi positif antar siswa dan guru akan lebih berhasil dalam menciptakan iklim belajar yang produktif (Fullan, 2007).

Teknologi dan media sosial kini juga berperan dalam membentuk relasi sosial di sekolah. Komunikasi dan interaksi siswa tidak hanya terbatas di ruang kelas tetapi juga berlangsung di dunia maya, yang dapat memperkuat maupun melemahkan solidaritas sosial (boyd, 2014).

Secara keseluruhan, relasi antar siswa, siswa-guru, dan budaya sekolah merupakan aspek yang saling terkait dan sangat memengaruhi proses pembelajaran serta perkembangan sosial

siswa. Memahami dan mengelola dinamika ini menjadi kunci bagi keberhasilan pendidikan yang inklusif dan demokratis.

3. Konflik, Solidaritas, dan Dinamika Kekuasaan di Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah ruang sosial yang penuh dengan dinamika konflik dan solidaritas yang mencerminkan kompleksitas hubungan antar aktor yang terlibat, seperti siswa, guru, staf, dan orang tua (Apple, 1990). Konflik di sekolah bisa muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, atau sumber daya yang terbatas, namun juga dapat menjadi pemicu perubahan sosial positif jika dikelola dengan tepat.

Konflik antar siswa, baik yang bersifat individual maupun kelompok, seringkali berkaitan dengan perbedaan identitas sosial seperti kelas, etnis, gender, dan status akademik (Coser, 1956). Misalnya, persaingan antar kelompok siswa dapat memicu bullying atau segregasi sosial yang memperlemah solidaritas dan menimbulkan ketegangan sosial.

Di sisi lain, solidaritas antar siswa atau antara siswa dan guru dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Solidaritas ini bisa terbentuk melalui kegiatan ekstrakurikuler, kerja kelompok, atau forum diskusi yang mendukung partisipasi aktif semua pihak (Durkheim, 1912).

Dinamika kekuasaan dalam pendidikan sering kali terlihat dalam struktur hirarkis antara guru dan siswa, serta antara manajemen sekolah dan komunitas pendidikan. Kekuasaan guru bukan hanya dalam otoritas formal tetapi juga dalam pengaruh simbolik yang menentukan norma dan perilaku yang diterima (Foucault, 1980).

Kekuasaan di sekolah tidak selalu berwujud dalam bentuk dominasi; ia juga bisa bersifat resistensi dan negosiasi. Siswa, misalnya, bisa melakukan resistensi melalui perilaku menentang aturan atau melalui strategi negosiasi sosial dengan guru dan teman sebaya (Willis, 1977).

Pendidikan juga dapat menjadi arena reproduksi ketimpangan sosial melalui mekanisme kekuasaan yang tersembunyi, seperti kurikulum tersembunyi yang mempromosikan nilai dan pengetahuan kelas dominan (Bourdieu & Passeron, 1990). Ini menyebabkan sebagian siswa merasa terpinggirkan dan kurang berdaya.

Namun, konflik di sekolah tidak selalu negatif. Konflik yang konstruktif dapat memicu diskusi kritis dan perubahan dalam budaya sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan dan keadilan sosial (Johnson & Johnson, 1995).

Solidaritas juga berperan penting dalam membangun komunitas sekolah yang inklusif dan suportif. Nilai-nilai seperti saling menghormati, kerjasama, dan empati perlu ditanamkan sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mendukung integrasi sosial (Putnam, 2000).

Peran guru dan kepala sekolah sangat penting dalam mengelola konflik dan memfasilitasi solidaritas. Kepemimpinan yang demokratis dan inklusif dapat menciptakan suasana di mana perbedaan dihargai dan konflik diselesaikan secara konstruktif (Fullan, 2007).

Secara keseluruhan, memahami dinamika konflik, solidaritas, dan kekuasaan di lingkungan pendidikan memungkinkan para pendidik dan pemangku kebijakan untuk

menciptakan lingkungan belajar yang adil, harmonis, dan memberdayakan seluruh warga sekolah.

4. Pengaruh Latar Belakang Sosial Siswa terhadap Pengalaman Belajar

Latar belakang sosial siswa merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pengalaman belajar dan keberhasilan pendidikan. Faktor ini mencakup status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, budaya, etnisitas, dan lingkungan sosial tempat siswa tumbuh (Coleman, 1988). Latar belakang sosial memengaruhi akses siswa terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan bimbingan belajar di rumah.

Penelitian Coleman (1966) menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang sosial berkontribusi signifikan terhadap disparitas hasil belajar siswa. Siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik karena mendapat dukungan materi dan non-materi yang memadai, serta lingkungan rumah yang kondusif untuk belajar.

Modal budaya yang dimiliki oleh keluarga juga memengaruhi cara siswa berinteraksi dengan sistem pendidikan. Bourdieu (1986) menekankan bahwa siswa yang berasal dari keluarga kelas menengah ke atas memiliki modal budaya yang sesuai dengan nilai dan norma sekolah, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan pengakuan akademik.

Sebaliknya, siswa dari latar belakang sosial yang kurang menguntungkan sering menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya pemahaman terhadap norma-norma akademik yang diharapkan sekolah. Hal

ini dapat menimbulkan kesenjangan prestasi yang terus berlanjut (Lareau, 2003).

Selain itu, faktor sosial seperti diskriminasi rasial atau stereotip negatif juga memengaruhi pengalaman belajar siswa. Siswa yang menjadi korban diskriminasi dapat mengalami penurunan motivasi dan rasa percaya diri, yang berujung pada prestasi akademik yang rendah (Steele, 1997).

Sekolah sebagai institusi sosial harus mampu memahami dan mengakomodasi perbedaan latar belakang sosial siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pendekatan pembelajaran yang diferensiasi dan dukungan sosial tambahan dapat membantu mengurangi ketimpangan tersebut (Gay, 2000).

Hubungan antara guru dan siswa juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Guru yang sensitif terhadap kondisi sosial siswa mampu membangun komunikasi yang lebih efektif dan meningkatkan motivasi belajar siswa (Delpit, 1995).

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat penting, namun tingkat keterlibatan ini juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Orang tua dari kelas sosial lebih rendah biasanya memiliki waktu, pengetahuan, atau sumber daya yang terbatas untuk mendukung pendidikan anak secara optimal (Epstein, 1995).

Program-program intervensi seperti beasiswa, bimbingan belajar, dan pelatihan orang tua dapat membantu mengatasi dampak negatif latar belakang sosial yang kurang menguntungkan dan meningkatkan peluang sukses siswa (Jeynes, 2007).

Kesimpulannya, latar belakang sosial siswa sangat menentukan pengalaman dan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memperhatikan konteks sosial dan menyediakan dukungan yang memadai agar pendidikan benar-benar dapat menjadi alat pemerataan sosial.

5. Konflik, Solidaritas, dan Dinamika Kekuasaan di Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan tidak hanya merupakan tempat untuk transfer pengetahuan, tetapi juga arena sosial di mana berbagai bentuk konflik, solidaritas, dan dinamika kekuasaan terjadi. Konflik di sekolah bisa muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, atau latar belakang sosial antara siswa, guru, dan pihak lain seperti orang tua atau pengelola sekolah (Apple, 2013).

Konflik ini bisa berwujud dalam bentuk persaingan antar kelompok siswa, ketegangan antara guru dan siswa, maupun pertentangan antara kurikulum resmi dan nilai-nilai yang dianut komunitas lokal. Konflik semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan dan pertarungan kekuasaan dalam struktur pendidikan (Ball, 2013).

Di sisi lain, solidaritas juga terbentuk di lingkungan sekolah sebagai respons terhadap konflik tersebut. Solidaritas bisa muncul antar siswa yang memiliki kesamaan latar belakang sosial, antar guru, atau antar siswa dan guru yang bekerja sama membangun iklim belajar yang positif (Durkheim, 1912).

Menurut Durkheim, solidaritas sosial adalah perekat utama dalam setiap institusi sosial, termasuk sekolah. Sekolah sebagai agen sosialisasi memainkan peran penting dalam

membentuk solidaritas ini melalui ritual bersama, nilai-nilai kolektif, dan norma yang diinternalisasi oleh peserta didik.

Namun, dinamika kekuasaan di sekolah sering kali tersembunyi dalam praktik sehari-hari, seperti aturan disiplin, evaluasi akademik, dan pengelolaan kelas. Michel Foucault (1977) mengemukakan bahwa kekuasaan di sekolah bersifat disipliner dan tersebar melalui mekanisme pengawasan, pengaturan perilaku, dan produksi pengetahuan yang mendukung status quo.

Konflik dan kekuasaan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan interpersonal tetapi juga berdampak pada hasil belajar dan kesejahteraan psikologis siswa. Kekuasaan yang tidak adil dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu, terutama siswa dari latar belakang sosial yang kurang beruntung (Apple, 2013).

Penanganan konflik di sekolah yang efektif membutuhkan pendekatan yang inklusif dan demokratis, di mana semua pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan seperti pendidikan anti-bullying, mediasi konflik, dan pengembangan kemampuan sosial-emotional siswa dapat meningkatkan solidaritas dan mengurangi konflik (Johnson & Johnson, 1996).

Penguatan solidaritas juga dapat terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa, yang memungkinkan siswa belajar berkolaborasi dan membangun jaringan sosial yang suportif (Putnam, 2000).

Secara keseluruhan, memahami konflik, solidaritas, dan dinamika kekuasaan dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, adil, dan produktif. Sekolah yang mampu mengelola dinamika ini dengan baik akan

menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga matang secara sosial.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Konflik di lingkungan sekolah biasanya muncul karena faktor berikut, kecuali:
 - a. Perbedaan latar belakang sosial siswa
 - b. Kurikulum yang seragam dan diterima semua pihak
 - c. Perbedaan kepentingan antara siswa dan guru
 - d. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan
2. Solidaritas dalam sekolah dapat dibentuk melalui:
 - a. Ketidakhadiran siswa dalam kegiatan sekolah
 - b. Kolaborasi antara siswa dan guru
 - c. Pemberian hukuman berat tanpa dialog
 - d. Persaingan antar siswa yang berlebihan
3. Menurut Foucault, kekuasaan di sekolah sering kali:
 - a. Terlihat jelas dalam kebijakan sekolah
 - b. Bersifat disipliner dan tersebar melalui pengawasan
 - c. Tidak berpengaruh pada hubungan antar siswa
 - d. Hanya dimiliki oleh kepala sekolah

4. Pendekatan yang efektif untuk menangani konflik di sekolah adalah:
 - a. Memberikan hukuman tanpa dialog
 - b. Mengabaikan perasaan siswa
 - c. Melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan
 - d. Memihak pada kelompok tertentu
5. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat meningkatkan:
 - a. Konflik antar siswa
 - b. Solidaritas dan jaringan sosial siswa
 - c. Ketimpangan sosial
 - d. Ketidakpedulian siswa terhadap lingkungan

Essay

1. Jelaskan bagaimana konflik sosial dapat muncul di lingkungan sekolah dan berikan contoh nyata dari kehidupan sekolah sehari-hari!
2. Diskusikan peran solidaritas sosial dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif di sekolah!
3. Bagaimana mekanisme kekuasaan menurut Michel Foucault diterapkan dalam sistem pendidikan formal? Jelaskan dampaknya terhadap siswa!
4. Apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengelola konflik secara efektif? Berikan minimal tiga contoh pendekatan!

5. Uraikan bagaimana latar belakang sosial siswa dapat mempengaruhi pengalaman belajar mereka di sekolah dan bagaimana sekolah dapat mengatasi ketimpangan tersebut!

D. Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Sage Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed.). Routledge.
- Hargreaves, D. H. (1967). *Social Relations in a Secondary School*. Routledge & Kegan Paul.
- Kozol, J. (1991). *Savage Inequalities: Children in America's Schools*. Crown Publishing Group.
- Mac an Ghail, M. (1994). *The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling*. Open University Press.
- Willis, P. (1977). *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. Saxon House.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications

BAB IX

PENDIDIIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep pendidikan sebagai modal sosial dalam pembangunan masyarakat.
2. Menganalisis peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat lokal dan nasional.
3. Menjelaskan keterkaitan antara pendidikan, literasi sosial, pendidikan karakter, dan kewargaan.
4. Mengevaluasi pendekatan pendidikan kritis dalam proses transformasi sosial.
5. Merumuskan strategi integrasi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan sosial berkelanjutan.

B. Materi Pembelajaran

1. Pendidikan sebagai Modal Sosial Pembangunan

Pendidikan bukan hanya instrumen untuk peningkatan kapasitas individu, tetapi juga fondasi utama bagi terbentuknya modal sosial dalam masyarakat. Modal sosial mengacu pada jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi

koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 2000). Pendidikan berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial melalui interaksi antar individu dalam institusi pendidikan yang membentuk nilai-nilai kolektif seperti solidaritas, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial.

Institusi pendidikan membentuk ruang sosial tempat terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan. Sekolah, misalnya, mengajarkan pentingnya kerja sama, disiplin, saling menghargai, dan integritas. Nilai-nilai ini merupakan elemen penting dari modal sosial yang berkontribusi terhadap kohesi sosial dan pembangunan masyarakat. Ketika pendidikan berhasil membentuk generasi yang terhubung secara sosial dan memiliki rasa tanggung jawab sosial, maka masyarakat memiliki bekal untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan (Coleman, 1988).

Pendidikan juga membentuk kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial yang diperlukan dalam partisipasi warga negara. Individu yang terdidik lebih cenderung terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan kewargaan lainnya. Hal ini memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam mengambil keputusan bersama dan memengaruhi arah pembangunan secara demokratis (Fukuyama, 2001).

Modal sosial tidak hanya terbentuk melalui pertemanan atau interaksi spontan, tetapi juga dibentuk secara sistematis melalui kurikulum dan aktivitas sekolah. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerja tim dan pengabdian masyarakat akan memperkuat ikatan sosial antar siswa, yang kelak menjadi bagian dari jaringan sosial yang produktif dalam

kehidupan bermasyarakat. Sekolah berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara aktif dan bertanggung jawab.

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan merata, kohesi sosial cenderung lebih kuat. Ketimpangan pendidikan, sebaliknya, dapat memperlemah modal sosial dengan menciptakan keterputusan antar kelompok sosial. Ketika akses terhadap pendidikan tidak merata, kelompok yang termarginalisasi akan kehilangan peluang untuk membangun jaringan dan kepercayaan sosial yang mendukung kemajuan bersama (OECD, 2001).

Selain memperkuat ikatan sosial horizontal, pendidikan juga memungkinkan pembentukan ikatan sosial vertikal, yaitu kepercayaan antara masyarakat dan institusi. Sekolah yang dikelola secara akuntabel dan partisipatif akan membentuk kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintahan secara umum. Ini menjadi modal penting dalam pelaksanaan program pembangunan, karena kepercayaan terhadap institusi memperlancar koordinasi dan implementasi kebijakan publik (Woolcock & Narayan, 2000).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendidikan membentuk tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga mampu bekerja dalam tim dan menjalin kerja sama. Ini adalah kualitas sosial yang penting dalam dunia kerja modern yang sangat kolaboratif. Tenaga kerja yang memiliki modal sosial tinggi akan lebih produktif dan inovatif karena mampu membangun jaringan profesional yang mendukung penciptaan nilai tambah (Schuller et al., 2000).

Pendidikan juga berperan dalam pengembangan kepemimpinan sosial. Melalui organisasi siswa, pelatihan kepemimpinan, dan keterlibatan dalam komunitas, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memimpin, menyelesaikan konflik, dan mengorganisasi kegiatan sosial. Pemimpin-pemimpin lokal yang berkualitas sering kali lahir dari lingkungan pendidikan yang memberi ruang bagi pembentukan karakter sosial tersebut.

Pentingnya pendidikan sebagai modal sosial juga terlihat dalam konteks kebencanaan atau krisis sosial. Masyarakat yang memiliki jaringan sosial kuat lebih cepat pulih dari krisis karena mereka memiliki solidaritas, rasa saling percaya, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi kesulitan. Pendidikan yang membekali nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial menjadi benteng pertama dalam membangun resiliensi masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya penting untuk mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga sebagai alat utama dalam pembentukan masyarakat yang kuat secara sosial. Dalam perspektif pembangunan sosial, investasi pada pendidikan berarti memperkuat fondasi modal sosial yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi, politik, dan budaya secara berkelanjutan.

2. Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat Lokal

Pendidikan memainkan peran strategis dalam pembangunan masyarakat lokal karena ia tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan individu, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Di banyak daerah, sekolah dan lembaga

pendidikan merupakan pusat kegiatan masyarakat yang menjadi tempat interaksi sosial, penyebaran informasi, serta penguatan nilai-nilai lokal (Tilaar, 2003). Pendidikan yang berbasis lokal mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjaga keberlanjutan budaya dan identitas komunitas.

Pendidikan lokal sangat penting dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut. Melalui penguatan pendidikan dasar dan menengah yang kontekstual, masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan lingkungan tempat tinggal mereka, misalnya dalam bidang pertanian, perikanan, atau kerajinan lokal. Ini akan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada urbanisasi atau migrasi ke kota besar (Fagerlind & Saha, 1989).

Pendidikan lokal juga menjadi instrumen pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dengan memasukkan konten lokal dalam kurikulum—seperti bahasa daerah, adat istiadat, dan sejarah lokal—pendidikan membantu menjaga identitas komunitas di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan nilai-nilai (Supriadi, 1999). Pelestarian budaya lokal melalui pendidikan memberikan kontribusi terhadap ketahanan budaya dan memperkuat rasa kebanggaan serta solidaritas sosial masyarakat.

Sekolah di masyarakat lokal juga memiliki peran sosial yang lebih luas dibanding di kota besar. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pemimpin komunitas. Peran ini terlihat dalam kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, advokasi lingkungan, hingga mediasi dalam konflik sosial. Maka,

peningkatan kualitas pendidikan lokal akan berdampak langsung pada kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, pendidikan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan yang baik, mereka akan lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Inilah esensi dari pembangunan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan (Sen, 1999).

Pendidikan yang dikembangkan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan, akan menghasilkan program yang lebih relevan dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Misalnya, program sekolah berbasis masyarakat (*community-based school*) yang melibatkan orang tua, tokoh adat, dan pemuda lokal telah terbukti memperkuat komitmen terhadap pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah di daerah tertinggal (UNESCO, 2005).

Keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan lokal juga terlihat dalam peningkatan akses terhadap layanan publik. Pendidikan yang baik membuka pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan, sanitasi, partisipasi politik, dan pelestarian lingkungan. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terdidik lebih sehat, lebih produktif, dan lebih aktif dalam kehidupan bernegara (World Bank, 2006).

Namun, masih banyak tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah lokal. Masalah seperti kurangnya guru, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, serta kurikulum

yang tidak relevan sering menghambat kemajuan pendidikan lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas pendidikan daerah melalui afirmasi anggaran, pelatihan guru, serta kolaborasi dengan aktor lokal (Tilaar, 2015).

Pendidikan juga dapat menjadi alat untuk meretas ketimpangan antar wilayah. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah, ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah dapat diperkecil. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung pemerataan pembangunan nasional dan penguatan integrasi sosial di tingkat nasional.

Kesimpulannya, pendidikan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan masyarakat lokal tidak hanya melalui peningkatan kemampuan individu, tetapi juga dalam memperkuat struktur sosial, budaya, dan ekonomi komunitas. Pendidikan yang kontekstual dan inklusif adalah kunci bagi pembangunan masyarakat lokal yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global.

3. Literasi Sosial, Pendidikan Karakter, dan Kewargaan

Literasi sosial merupakan kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan bertindak secara reflektif terhadap dinamika sosial yang ada di sekitarnya. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap norma, nilai, struktur sosial, konflik, serta peran individu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, literasi sosial menjadi bagian penting dalam membentuk warga negara yang sadar sosial dan aktif secara demokratis (Freire, 1970).

Pendidikan karakter merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian peserta didik melalui penginternalisasian nilai-nilai moral, etika, dan kebajikan universal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan toleransi sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan demokratis. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran, tetapi juga melalui keteladanan guru, budaya sekolah, dan lingkungan sosial siswa (Lickona, 1991).

Kewargaan atau civic education adalah pendidikan yang menyiapkan warga negara agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas politik. Pendidikan kewargaan yang baik mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan sosial (Print, 2007).

Ketiga elemen ini—literasi sosial, pendidikan karakter, dan kewargaan—berkaitan erat satu sama lain. Literasi sosial memberikan pemahaman atas realitas sosial, pendidikan karakter menanamkan nilai dalam menyikapi realitas tersebut, sementara pendidikan kewargaan mendorong tindakan aktif dalam ranah publik. Oleh karena itu, integrasi ketiganya dalam sistem pendidikan sangat penting untuk menciptakan warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.

Implementasi ketiga pilar ini dalam kurikulum pendidikan memerlukan pendekatan holistik. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis proyek sosial, siswa dapat diajak mengidentifikasi masalah sosial di sekitarnya, menganalisis

penyebabnya, serta merancang solusi kolektif. Kegiatan seperti ini tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga menanamkan rasa empati dan tanggung jawab sosial (Dewey, 1938).

Di Indonesia, upaya penguatan pendidikan karakter dan kewargaan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan Kemendikbud. Namun, tantangan utama adalah inkonsistensi dalam implementasi, serta masih minimnya pelatihan bagi guru dalam menyampaikan materi karakter dan kewargaan secara kontekstual dan inspiratif (Zubaedi, 2011).

Pendidikan karakter dan kewargaan tidak bisa hanya bersifat teoritis, tetapi harus tercermin dalam praktik sehari-hari di sekolah. Misalnya, bagaimana siswa diajak berdiskusi secara demokratis, diberi ruang untuk menyuarakan pendapat, atau diajak dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, pelayanan masyarakat, atau advokasi lingkungan. Nilai-nilai itu harus menjadi budaya sekolah, bukan sekadar wacana di ruang kelas.

Literasi sosial juga menjadi penting di era digital. Banyak pelajar terpapar informasi dan opini melalui media sosial, namun belum memiliki kemampuan literasi kritis untuk memilah informasi yang benar, memahami konteks sosial, atau merespons perbedaan secara konstruktif. Oleh karena itu, pendidikan saat ini harus mencakup literasi media, empati digital, serta penguatan nilai toleransi dalam ruang virtual (Rheingold, 2012).

Pengembangan literasi sosial, pendidikan karakter, dan kewargaan juga penting untuk mencegah berbagai bentuk intoleransi, radikalisme, dan kekerasan di sekolah. Ketika siswa dibekali dengan pemahaman sosial yang mendalam dan nilai-

nilai kemanusiaan, mereka akan lebih siap menghadapi keberagaman dan perbedaan dengan sikap terbuka dan damai.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga menciptakan warga negara yang memiliki kepekaan sosial, integritas moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Literasi sosial, pendidikan karakter, dan kewargaan adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Pendidikan Kritis untuk Transformasi Sosial

Pendidikan kritis adalah pendekatan pedagogis yang bertujuan membangkitkan kesadaran peserta didik terhadap kondisi sosial mereka dan mendorong tindakan kolektif untuk mengubah ketidakadilan struktural. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, di mana ia menolak model pendidikan “bank” yang bersifat satu arah dan pasif, dan mendorong model pendidikan dialogis yang partisipatif dan transformatif.

Dalam kerangka pendidikan kritis, peserta didik tidak diperlakukan sebagai objek yang hanya menerima pengetahuan, melainkan sebagai subjek aktif yang mampu menafsirkan realitas sosial mereka sendiri. Pendidikan kritis mengajak siswa untuk mengidentifikasi penindasan dan ketimpangan yang mereka alami atau saksikan, serta menemukan cara untuk mengubahnya melalui refleksi dan aksi kolektif (Giroux, 1988).

Pendidikan kritis menekankan pentingnya “kesadaran kritis” (*conscientization*)—kemampuan untuk melihat keterkaitan antara pengalaman pribadi dan struktur sosial yang lebih luas. Melalui kesadaran ini, individu tidak lagi menyalahkan diri

sendiri atas kegagalan sosial, tetapi memahami bahwa struktur sosial seperti kelas, ras, dan gender turut membentuk pengalaman mereka (McLaren, 1998).

Di lingkungan sekolah, pendidikan kritis dapat diterapkan melalui metode pembelajaran berbasis masalah sosial, diskusi dialogis, teater forum, serta proyek sosial yang menantang status quo. Misalnya, siswa dapat diajak meneliti ketimpangan pendidikan di daerah mereka, mempresentasikan hasilnya, dan menyusun kampanye advokasi bersama komunitas lokal.

Transformasi sosial melalui pendidikan hanya dapat tercapai jika proses belajar mengajar tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi juga membentuk kesadaran dan keberanian moral untuk menantang ketidakadilan. Guru dalam pendidikan kritis berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sebagai otoritas tunggal dalam kelas. Ini menciptakan ruang dialogis dan saling menghargai antar semua peserta didik (Shor, 1992).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kritis masih menjadi tantangan karena kurikulum yang cenderung padat dan berorientasi pada ujian, serta budaya birokratis yang membatasi kebebasan berpikir. Meski demikian, sejumlah inisiatif alternatif seperti sekolah komunitas, pesantren progresif, dan gerakan literasi telah menunjukkan bahwa pendekatan kritis bisa dijalankan secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Pendidikan kritis juga penting dalam membangun masyarakat demokratis. Ketika warga negara diajak berpikir kritis, mereka akan lebih aktif dalam mengontrol kebijakan publik, menolak manipulasi media, dan memperjuangkan hak-

hak mereka. Hal ini memperkuat kehidupan demokrasi dan mendorong partisipasi sosial yang lebih inklusif (Apple, 2004).

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terfragmentasi, pendidikan kritis menjadi strategi penting untuk merespons isu-isu global seperti ketimpangan, perubahan iklim, dan konflik identitas. Siswa yang dibekali pendidikan kritis akan lebih siap menghadapi tantangan tersebut dengan pendekatan reflektif, etis, dan transformatif.

Dengan demikian, pendidikan kritis tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan individual, tetapi juga sebagai kekuatan kolektif untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendidikan yang berorientasi pada emansipasi adalah inti dari pembangunan sosial yang sejati..

5. Merumuskan Strategi Integrasi antara Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Sosial Berkelanjutan

Integrasi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan sosial berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Strategi ini harus berpijak pada pemahaman bahwa pendidikan tidak sekadar sarana untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai pilar utama dalam membentuk masyarakat yang sadar lingkungan, toleran, dan berorientasi pada keberlanjutan hidup bersama (UNESCO, 2017).

Pembangunan sosial berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terhubung. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dikembangkan agar mendukung kesadaran terhadap ketiga dimensi ini. Hal ini bisa dimulai dari integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam kurikulum

pendidikan, baik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi, seperti pendidikan lingkungan hidup, keadilan sosial, dan kewargaan global (Sterling, 2001).

Strategi integrasi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah perlu merancang kebijakan pendidikan yang mendukung pemerataan akses, penguatan literasi sosial, serta pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan empati. Di sisi lain, lembaga pendidikan perlu mempraktikkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi siswa, serta budaya sekolah yang inklusif (Tilbury & Wortman, 2004).

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan juga harus mengadopsi pendekatan partisipatif dan kontekstual, yakni membangun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal serta melibatkan komunitas dalam proses pembelajaran. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah pesisir dapat memasukkan pendidikan kelautan dan konservasi, sementara sekolah di daerah perkotaan dapat mengembangkan praktik urban farming atau pendidikan multikultural (Wals & Corcoran, 2012).

Strategi integratif ini juga perlu memperhatikan keadilan antar generasi. Artinya, pendidikan harus membekali generasi muda dengan kesadaran dan keterampilan untuk menjaga keberlanjutan alam dan sosial demi masa depan mereka sendiri dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan harus mencakup indikator-indikator keberlanjutan, bukan hanya output akademik atau capaian ekonomi semata (Mezirow, 2000).

Sebagai bagian dari pembangunan sosial, pendidikan juga perlu memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghapusan diskriminasi. Strategi integrasi ini harus melindungi kelompok rentan dan menjamin partisipasi aktif semua warga negara dalam proses pendidikan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak marginal, serta kelompok adat.

Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan krisis ekonomi, pendidikan harus mempersiapkan warga negara yang resilien, adaptif, dan solutif. Ini hanya bisa dicapai jika sistem pendidikan dirancang untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) dan mendorong keterlibatan sosial aktif (Delors et al., 1996).

Peran teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi integrasi ini. Teknologi pendidikan harus dimanfaatkan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menghubungkan siswa dengan isu-isu global yang relevan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi harus disertai literasi digital yang kritis dan kesadaran etis agar tidak memperdalam ketimpangan digital.

Dengan demikian, merumuskan strategi integrasi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan sosial berkelanjutan menuntut pendekatan yang sistemik, interdisipliner, dan berbasis nilai. Pendidikan yang dirancang dengan visi keberlanjutan akan menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial yang adil dan berkesinambungan.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Pendidikan sebagai modal sosial berfungsi untuk:
 - a. Menciptakan elit akademik
 - b. Memperkuat jaringan sosial dan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat
 - c. Meningkatkan pendapatan individu semata
2. Menjaga status quo dalam struktur sosial
Contoh praktik pendidikan dalam pembangunan masyarakat lokal adalah:
 - a. Olimpiade sains internasional
 - b. Program beasiswa luar negeri
 - c. Sekolah adat yang mengajarkan kearifan lokal
 - d. Bimbingan belajar privat
3. Pendidikan karakter dan literasi sosial mendorong pembangunan karena:
 - a. Mempercepat modernisasi budaya
 - b. Menjadikan siswa patuh terhadap perintah
 - c. Membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab warga negara
 - d. Mengurangi kebutuhan pelatihan kerja

4. Salah satu prinsip utama dalam pendidikan kritis menurut Paulo Freire adalah:
 - a. Evaluasi standar nasional
 - b. Transfer pengetahuan secara satu arah
 - c. Dialog dan kesadaran kritis terhadap realitas sosial
 - d. Kompetisi individu
5. Integrasi antara pendidikan dan pembangunan sosial berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. Menjamin dominasi kebijakan pusat
 - b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi semata
 - c. Membangun masyarakat yang adil dan ramah lingkungan
 - d. Menyaring peserta didik unggul

Essay

1. Jelaskan bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai modal sosial dalam pembangunan masyarakat!
2. Analisis peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat lokal, sertakan contoh konkret dari praktik pendidikan berbasis komunitas!
3. Mengapa literasi sosial, pendidikan karakter, dan kewargaan penting dalam proses pembangunan sosial? Jelaskan keterkaitannya!
4. Uraikan konsep pendidikan kritis menurut Paulo Freire dan bagaimana pendekatan ini dapat mentransformasi masyarakat!

5. Rancanglah strategi integrasi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan sosial berkelanjutan yang bisa diterapkan di sekolah atau komunitas lokal!

D. Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Suharto, E. (2010). *Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Refika Aditama.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Satria, A. (2009). *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Praktik*. LP3ES.
- Kabeer, N. (2005). Inclusive citizenship: Meanings and expressions. *Zed Books*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy*. Bloomsbury Academic.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. UNESCO Publishing.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Pendidikan dan Kekuasaan*. Rineka Cipta.

- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Kemendikbud. (2020). *Strategi Nasional Pendidikan Karakter*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB X

REFLEKSI DAN PROSPEK SOSIOLOGI PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengevaluasi sistem pendidikan nasional dari perspektif sosiologis.
2. Menganalisis tantangan dan peluang dalam praktik pendidikan di Indonesia.
3. Menjelaskan peran sosiolog pendidikan dalam merespons dinamika masyarakat modern.
4. Merumuskan gagasan transformasi pendidikan berbasis keadilan sosial dan inklusivitas.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan dan praksis pendidikan yang progresif dan kontekstual.

B. Materi Pembelajaran

1. Evaluasi Sistem Pendidikan dari Perspektif Sosiologis

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa, baik dari sisi kurikulum, struktur kelembagaan, hingga arah kebijakan. Namun dari sudut pandang sosiologis, sistem pendidikan kita masih menghadapi tantangan besar dalam hal kesetaraan, aksesibilitas, relevansi, dan keadilan sosial. Pendidikan belum sepenuhnya menjadi

instrumen pembebasan dan mobilitas sosial seperti yang diidealkan dalam teori-teori fungsionalis (Durkheim, 1956), karena masih terjadi kesenjangan kualitas antarwilayah dan antarstrata sosial.

Pendidikan di Indonesia, dalam banyak kasus, justru mereproduksi ketimpangan sosial yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Bowles dan Gintis (1976) dalam teori reproduksi sosial, sistem pendidikan sering kali mencerminkan struktur kelas sosial yang ada di masyarakat, sehingga anak-anak dari kelas sosial menengah ke bawah tetap sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan bermutu, fasilitas yang memadai, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Selain itu, pendekatan pedagogis yang diterapkan di berbagai sekolah masih cenderung bersifat monologis dan otoriter. Paulo Freire (1970) mengkritik pendidikan yang bersifat "banking education", yaitu proses belajar-mengajar yang menjadikan siswa sebagai objek pasif untuk menerima pengetahuan, bukan subjek yang aktif dan kritis. Hal ini menghambat pembentukan kesadaran kritis (*conscientization*) yang penting untuk mendorong transformasi sosial.

Evaluasi dari perspektif konflik sosial (Marxian) melihat bahwa pendidikan telah menjadi arena kontestasi ideologi. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga institusi yang menginternalisasikan nilai-nilai dominan dari kelas penguasa. Buku teks, kurikulum, dan praktik pendidikan sering kali mengabaikan keragaman sosial-budaya lokal dan memaksakan nilai-nilai sentralistik yang kurang relevan secara kontekstual.

Sementara itu, dari perspektif interaksionisme simbolik (Mead, Blumer), relasi sosial di ruang kelas seperti antara guru dan murid, atau antar siswa, sangat memengaruhi persepsi diri dan motivasi belajar. Labelisasi negatif, seperti "anak bodoh", "nakal", atau "tidak mampu", bisa melekat pada siswa dari latar belakang minoritas atau miskin, yang pada gilirannya menciptakan self-fulfilling prophecy (Merton, 1948) dan menghambat prestasi mereka.

Pendidikan di Indonesia juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Ketidaksesuaian antara kurikulum dan realitas lokal menyebabkan lulusan sekolah dan perguruan tinggi sering mengalami mismatch dengan dunia kerja. Sosiologi pendidikan mendorong agar kurikulum disusun secara partisipatif, kontekstual, dan sensitif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pendidikan masih terpusat pada pencapaian kognitif dan kurang memberi ruang pada aspek afektif dan sosial. Padahal dalam pendekatan holistik, pendidikan semestinya tidak hanya mencetak individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga peduli, kritis, dan memiliki etika sosial yang tinggi. Pendidikan karakter harus ditanamkan melalui praksis sosial, bukan sekadar hafalan nilai.

Isu komersialisasi pendidikan semakin menajamkan ketimpangan. Institusi pendidikan swasta unggulan kerap kali hanya bisa diakses oleh kalangan menengah atas, sementara sekolah-sekolah negeri di daerah tertinggal kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Negara harus hadir untuk menjamin pendidikan sebagai hak dasar warga, bukan sebagai komoditas pasar (Illich, 1971).

Di sisi lain, beberapa inovasi telah muncul, seperti sekolah inklusi, pendidikan berbasis komunitas, dan gerakan literasi sosial. Namun inisiatif ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan nasional secara menyeluruh. Evaluasi sistemik diperlukan agar inovasi-inovasi tersebut dapat direplikasi dan diperluas.

Dengan demikian, pendekatan sosiologis terhadap evaluasi pendidikan menekankan pentingnya melihat sistem pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial yang kompleks. Evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga bagaimana pendidikan berkontribusi pada keadilan sosial, pemberdayaan komunitas, dan pembentukan masyarakat demokratis.

2. Peran Sosiolog Pendidikan di Masa Depan

Sosiolog pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh dunia pendidikan di masa depan. Di tengah perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas masyarakat modern, sosiolog pendidikan diharapkan mampu menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praksis pendidikan yang berkeadilan. Mereka harus tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor perubahan sosial melalui pendidikan.

Pertama, sosiolog pendidikan harus mampu menganalisis bagaimana sistem pendidikan berinteraksi dengan struktur sosial yang lebih luas, seperti kelas, etnisitas, gender, dan kekuasaan. Mereka dapat mengungkap bagaimana institusi pendidikan mereproduksi atau menantang ketimpangan sosial. Perspektif kritis ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil (Apple, 2004).

Kedua, mereka berperan dalam mengembangkan pendekatan pendidikan yang kontekstual dan sensitif terhadap dinamika lokal. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, sosiolog pendidikan perlu memfasilitasi penyusunan kurikulum dan pedagogi yang memperhatikan kearifan lokal dan keberagaman budaya. Ini sejalan dengan gagasan pendidikan multikultural dan dekolonial (Banks, 2009).

Ketiga, sosiolog pendidikan dapat berkontribusi dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dengan bekal metodologi yang kuat dan pendekatan teoritis yang beragam, mereka dapat memberikan analisis berbasis data sosial yang komprehensif, termasuk dalam mengevaluasi dampak kebijakan afirmatif, BOS, zonasi, digitalisasi sekolah, dan pendidikan karakter terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, di tengah era disrupsi digital, sosiolog pendidikan perlu aktif meneliti dampak teknologi terhadap pola belajar, interaksi sosial di sekolah, serta kesenjangan digital (*digital divide*). Mereka harus mengadvokasi kebijakan yang menjamin akses merata terhadap infrastruktur digital dan memperhatikan dimensi etika serta sosial dari digitalisasi pendidikan (Selwyn, 2016).

Sosiolog pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat literasi sosial dan kritis di kalangan pendidik dan peserta didik. Ini termasuk membangun kesadaran terhadap isu-isu ketimpangan, lingkungan, dan demokrasi. Pendidikan tidak boleh semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi harus menjadi ruang pembentukan warga negara yang reflektif dan bertanggung jawab sosial (Giroux, 1983).

Dalam dunia akademik, sosiolog pendidikan harus mendorong kolaborasi antardisiplin untuk mengembangkan penelitian yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat. Kolaborasi dengan bidang antropologi, psikologi pendidikan, teknologi pendidikan, dan kebijakan publik akan memperkaya perspektif dan solusi yang dihasilkan.

Peran advokasi juga menjadi penting. Sosiolog pendidikan di masa depan tidak cukup hanya menulis jurnal atau buku, tetapi juga harus hadir dalam ruang-ruang publik, termasuk media, forum kebijakan, dan komunitas akar rumput. Mereka harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dan pengambil kebijakan pendidikan.

Di tingkat global, sosiolog pendidikan dapat berperan dalam merespon tantangan transnasional seperti migrasi pendidikan, homogenisasi kurikulum, atau neoliberalisme pendidikan. Mereka harus memperjuangkan paradigma pendidikan yang berbasis keadilan sosial global dan solidaritas antarbangsa (Torres, 2011).

Dengan demikian, sosiolog pendidikan masa depan adalah intelektual publik yang kritis, reflektif, dan transformatif. Mereka harus mampu memahami dinamika lokal sekaligus berpikir global, serta menjadikan pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, setara, dan manusiawi.

3. Rekomendasi untuk Kebijakan dan Praksis Pendidikan

Rekomendasi kebijakan dan praksis pendidikan dari perspektif sosiologi harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan akses, dan keberlanjutan. Sosiolog pendidikan

memandang bahwa pendidikan bukan semata proses transfer ilmu, tetapi sebuah mekanisme sosial yang membentuk struktur masyarakat masa depan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial, bukan mereproduksinya.

Pertama, perlu ada reformasi dalam kebijakan pendanaan pendidikan agar lebih berkeadilan. Daerah-daerah tertinggal dan kelompok sosial marginal harus mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional berdasarkan kebutuhan sosial dan tingkat ketertinggalan. Pendekatan ini dikenal sebagai *affirmative budgeting*, yang mengutamakan keadilan substantif (Sen, 1999).

Kedua, kurikulum harus dirancang secara inklusif, kontekstual, dan kritis. Kurikulum yang terlalu sentralistik dan seragam sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, sosiolog pendidikan merekomendasikan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum, serta integrasi nilai-nilai lokal, multikulturalisme, dan literasi sosial ke dalam isi pembelajaran (Banks, 2009).

Ketiga, perlu penguatan pendidikan karakter yang tidak bersifat indoktrinatif, tetapi dialogis dan berbasis refleksi sosial. Pendidikan karakter harus berorientasi pada penguatan nilai-nilai kewargaan kritis, seperti empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana dikembangkan dalam pedagogi Paulo Freire (1970).

Keempat, digitalisasi pendidikan harus dilakukan secara bijak dan adil. Sosiolog pendidikan menyarankan adanya regulasi yang menjamin akses digital yang merata dan pelatihan digital bagi guru dan siswa di daerah tertinggal. Ketimpangan

digital tidak boleh dibiarkan menjadi bentuk baru dari eksklusif sosial (Selwyn, 2016).

Kelima, praktik pedagogi harus didorong ke arah *student-centered learning* yang partisipatif, kolaboratif, dan relevan secara sosial. Guru sebaiknya tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator dan pendamping refleksi sosial siswa. Ini akan menciptakan ruang belajar yang lebih demokratis dan bermakna (Giroux, 1988).

Keenam, perlu pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga aspek sosial, afektif, dan partisipatif siswa. Ukuran keberhasilan pendidikan harus dilihat dari dampaknya terhadap pembentukan warga negara yang kritis dan berdaya, bukan sekadar nilai ujian.

Ketujuh, rekomendasi juga mencakup perlunya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan dunia usaha, komunitas lokal, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang solusi atas berbagai masalah pendidikan (UNESCO, 2015).

Kedelapan, sosiolog pendidikan menyarankan agar riset-riset sosial pendidikan diperkuat dan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Bukti empiris dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif sangat penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis data dan sesuai dengan realitas sosial di lapangan.

Kesembilan, kebijakan pendidikan di masa depan juga harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengarusutamaan isu lingkungan, keadilan gender, dan perdamaian dalam proses pendidikan, sejalan dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat (pendidikan berkualitas).

Kesepuluh, seluruh kebijakan dan praksis pendidikan yang disarankan harus dikawal oleh prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keterlibatan publik. Pendidikan harus menjadi ruang sosial yang memberdayakan, bukan menindas; yang membuka ruang kritik, bukan menutupnya.

C. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Apa yang menjadi fokus utama evaluasi sistem pendidikan dari perspektif sosiologi?
 - a. Efisiensi biaya operasional sekolah
 - b. Tingkat kelulusan ujian nasional
 - c. Keadilan akses, kualitas pendidikan, dan dampak sosialnya
 - d. Jumlah siswa dalam satu kelas
2. Siapakah tokoh yang mengemukakan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan dari penindasan sosial melalui pendekatan pendidikan kritis?
 - a. Emile Durkheim
 - b. Karl Marx
 - c. Paulo Freire
 - d. Max Weber

3. Dalam kerangka sosiologi pendidikan, peran sosiolog pendidikan di masa depan antara lain adalah...
 - a. Mengelola anggaran sekolah
 - b. Meningkatkan skor PISA siswa
 - c. Memberi kontribusi dalam merancang kebijakan pendidikan yang adil dan inklusif
 - d. Menyusun kurikulum matematika dan IPA
4. Menurut Giroux, pendidikan harus menjadi alat untuk...
 - a. Mempersiapkan tenaga kerja yang patuh
 - b. Menyaring siswa berdasarkan kecerdasan
 - c. Membangun kesadaran kritis dan perubahan sosial
 - d. Melestarikan sistem sosial yang mapan
5. Salah satu kelemahan sistem pendidikan Indonesia saat ini yang dikritik dari perspektif sosiologis adalah...
 - a. Terlalu banyak pelajaran olahraga
 - b. Tidak adanya pelajaran Sejarah
 - c. Kurangnya keterkaitan antara pendidikan dan konteks sosial budaya
 - d. Terlalu banyak jam kosong

Essay

1. Jelaskan bagaimana pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia!
2. Apa peran sosiolog pendidikan dalam merancang kebijakan pendidikan masa depan? Berikan contoh konkret!
3. Bagaimana pendidikan dapat mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan menurut perspektif sosiologi?
4. Mengapa penting untuk mengintegrasikan literasi sosial dan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional?
5. Uraikan strategi untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan partisipatif di Indonesia berdasarkan refleksi sosiologis!

D. Daftar Pustaka

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (3rd ed.). RoutledgeFalmer.
- Ball, S. J. (2008). *The Education Debate*. Policy Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (hlm. 241–258). Greenwood.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Giroux, H. A. (2011). *On Critical Pedagogy*. Bloomsbury Academic.
- Illich, I. (1971). *Deschooling Society*. Harper & Row.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.
- Sadovnik, A. R. (2007). *Sociology of Education: A Critical Reader*. Routledge.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* UNESCO Publishing.
- Young, M. (2008). *Bringing Knowledge Back In: From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education*. Routledge.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd., lahir pada tanggal 8 Juli 1989 di Desa Bontobangun, Kabupaten Bulukumba. Ia merupakan putra dari Bapak Samude dan Ibu Hasmi. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di SDN 212 Bontobangun dan SMP 2 Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bantaeng.

Pada tahun 2008, Dr. Irwan melanjutkan studi ke Universitas Negeri Makassar, Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas Seni dan Desain. Setelah menyelesaikan studi S-1 pada tahun 2012, beliau mulai mengajar di SMP PGRI Kota Makassar, sekaligus aktif melakukan pendampingan seni di berbagai kampung dan komunitas, termasuk di Padang Panjang, Singapura, dan Malaysia.

Pada tahun 2014, Dr. Irwan menempuh studi S-2 di Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial, Konsentrasi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, dan berhasil lulus pada tahun 2016. Selama periode tersebut hingga tahun 2021, beliau juga mengabdikan sebagai Dosen Luar Biasa di Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

Tahun 2017 menjadi tonggak awal kiprahnya sebagai dosen tetap di Universitas Sawerigading Makassar pada Program Studi Sosiologi. Pada tahun 2020, beliau diangkat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi masa bakti 2020–2024.

Komitmen akademiknya terus berlanjut dengan menempuh studi S-3 pada tahun 2020 di Program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, melalui beasiswa LPDP. Studi doktoralnya diselesaikan pada tahun 2023 dengan predikat cum laude. Penulis dapat dihubungi melalui email: irwanunsa212@gmail.com.



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si. lahir di Makassar, 5 Oktober 1970. Saat ini sebagai staff pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bosowa, Makassar. Ia menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas 45 di Tahun 1990, kemudian melanjutkan jenjang Magister (S2) di Pascasarjana Universitas 45 pada tahun 2007, dan meraih gelar Doktor (S3) dari Pascasarjana Universitas Negeri Makassar pada tahun 2020.

Selain berkiprah di dunia akademik, Dr. A.Burchanuddin juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kemasyarakatan (LP2K), sebuah lembaga yang fokus pada isu-isu sosial dan pengembangan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Beliau aktif dalam berbagai organisasi profesi dan olahraga, di antaranya sebagai Dewan Penasehat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulawesi Selatan, Dewan Penasehat Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sulawesi Selatan, Pembina pada beberapa organisasi Pemuda dan Pencinta Alam Sulawesi Selatan, serta sebagai anggota Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Sulawesi Selatan.

Dr. A. Burchanuddin juga secara aktif menulis artikel dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan ilmiah, termasuk simposium nasional dan internasional, yang menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan jaringan akademik global.